



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1977, 2017

KEMENKEU. Data dan Informasi Perpajakan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 228/PMK.03/2017

TENTANG

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN
DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan telah diatur dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;
- b. bahwa terhadap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diwajibkan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud dalam huruf a, terdapat perubahan rincian jenis data dan informasi yang harus disampaikan serta penambahan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain;

- c. bahwa untuk melaksanakan simplifikasi ketentuan yang mengatur mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN.

Pasal 1

- (1) Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis, yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan/harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan.
- (3) Data dan informasi yang wajib diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rincian jenis data dan informasi.
- (4) Termasuk dalam pengertian rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penjelasan dan keterangan yang terkait dengan data yang diberikan.
- (5) Rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara berkala sesuai dengan jadwal penyampaian yang telah ditentukan.
- (6) Direktur Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan data dan informasi yang disampaikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain apabila data dan informasi yang disampaikan telah lengkap sesuai dengan rincian jenis data dan informasi yang ditentukan.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan rincian jenis data dan informasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dapat menyampaikan perubahan rincian jenis data dan informasi tersebut pada jadwal penyampaian berikutnya.
- (8) Dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktorat Jenderal Pajak berwenang meminta data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (9) Mekanisme permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Pasal 2

- (1) Rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) harus diberikan dalam bentuk elektronik.
- (2) Yang dimaksud dengan rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rincian jenis data dan informasi yang sifat dan bentuknya elektronik yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya, yang disimpan dalam media elektronik dan/atau yang masih berada dalam suatu jaringan elektronik.
- (3) Rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara *online* atau secara langsung.
- (4) Dalam hal penyampaian rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik dilakukan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyampaiannya dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang tersedia.
- (5) Dalam hal penyampaian rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang berupa sarana penyimpan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data.
- (6) Dalam hal terjadi kegagalan dalam jaringan komunikasi yang mengakibatkan rincian jenis data dan informasi tidak dapat disampaikan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rincian jenis data dan informasi dapat disampaikan secara langsung.

Pasal 3

- (1) Dalam hal rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum tersedia dalam bentuk elektronik, rincian jenis data dan informasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk non-elektronik.
- (2) Penyampaian rincian jenis data dan informasi dalam bentuk non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sampai batas waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak jadwal penyampaian yang pertama ditentukan.
- (3) Setelah batas waktu paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain harus memberikan rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik.

Pasal 4

- (1) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan rincian jenis data dan informasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan penunjukan tersebut diberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menerima rincian jenis data dan informasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan penunjukan tersebut diberitahukan kepada pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.

Pasal 5

- (1) Penetapan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), serta jadwal penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, serta rincian jenis data dan informasi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengubah Peraturan Menteri ini.
- (3) Perubahan atas deskripsi pada kolom 4, bentuk data pada kolom 5, cara penyampaian pada kolom 6, dan jadwal penyampaian pada kolom 8 dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dilakukan dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, setelah instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 30);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 594);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.03/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 879);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1174);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1457); dan
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 442),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali tanggal penyampaian pertama kali yang tercantum dalam lampiran.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 228/PMK.03/2017
 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA
 CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN
 DENGAN PERPAJAKAN

**Daftar Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, Dan Pihak Lain,
 Rincian Jenis Data Dan Informasi, Bentuk Data, Cara dan Jadwal Penyampaian**

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan	I. PAGU, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Satuan Kerja (satker) 2. Bagian anggaran K/L 3. Unit eselon I 4. Nama program 5. Nama kegiatan 6. Output kegiatan 7. Lokasi 8. Kabupaten/kota 9. Kewenangan pelaksanaan kegiatan anggaran 10. Nama akun	PAGU anggaran Surat Pengesahan RKAKL (SP-RKAKL) Kementerian/Lembaga (K/L)	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11. KPPN 12. Referensi pembebanan pada APBN 13. Jenis bantuan 14. Register PHLN 15. Sumber dana 16. Fungsi rencana kerja anggaran 17. Subfungsi rencana kerja anggaran 18. Jumlah PAGU dalam Rupiah					
		II. Proyeksi Fiskal Jangka Menengah III. Proyek Ekonomi Makro Jangka Menengah	Informasi proyeksi untuk memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan yang akan dipakai dalam Pembahasan Rancangan APBN Informasi Proyeksi yang akan dipakai dalam Penyusunan RAPBN	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Tahunan (paling lambat minggu kedua bulan Mei)
				Elektronik	Online	1 Mei 2013	Tahunan (paling lambat minggu kedua bulan Mei)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IV. Nota Keuangan dan RAPBN	Informasi perkembangan ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal dan rancangan anggaran dan pendapatan negara pemerintah pusat, kebijakan desentralisasi fiskal, pembiayaan defisit anggaran, pengelolaan utang dan risiko fiskal	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Tahunan (paling lambat minggu kedua bulan Mei)
		V. Penerimaan PNBP dari Iuran Tetap untuk Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	Penerimaan PNBP dari iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral logam dan batubara	Elektronik	Online	31 Desember 2017	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)
		VI. Penerimaan PNBP dari Iuran Produksi/Royalti	Penerimaan PNBP dari iuran produksi/royalti	Elektronik	Online	31 Desember 2017	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)
		VII. Penerimaan PNBP dari Iuran Tetap untuk Usaha Pertambangan Panas Bumi	Penerimaan PNBP dari iuran tetap untuk usaha pertambangan panas bumi	Elektronik	Online	31 Desember 2017	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VIII. Penerimaan Iuran Produksi/Royalti untuk Izin Usaha Pertambangan Uap dan Listrik	Penerimaan iuran produksi/royalti untuk Izin Usaha Pertambangan Uap dan Listrik	Elektronik	Online	31 Desember 2017	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)
		IX. Provisi Sumber Daya Hutan	Provisi sumber daya hutan	Elektronik	Online	31 Desember 2017	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)
		X. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam	Iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam	Elektronik	Online	31 Desember 2017	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)
		XI. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dengan Sistem Perumudaan Buatan	Iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman dengan Sistem Perumudaan Buatan	Elektronik	Online	31 Desember 2017	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)
		XII. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	Iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	Elektronik	Online	31 Desember 2017	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPbn), Kementerian Keuangan	I. Data MPN, yang paling sedikit memuat: 1. Nama KPPN 2. Tanggal pembukuan 3. Nama bank/ pos 4. NTB (Nomor Transaksi Bank) 5. NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) 6. Akun penerimaan 7. Nilai setor rupiah 8. Nomor urut transaksi 9. <i>Reversal flag</i> kegiatan anggaran 10. <i>Flag</i> hasil rekon atas 11. <i>Flag</i> hasil rekon bawah 12. <i>Id</i> database 13. <i>Id</i> baris 14. Nomor Pokok Wajib Pajak 15. Kode KPP (Kantor Pelayanan Pajak)	Data transaksi MPN (Modul Penerimaan Negara) yang telah di rekon oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juli dan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yang paling sedikit memuat: 1. Kode KPPN sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran 2. Sumber <i>Jurnal Entry</i> (JE) 3. Kode Satuan Kerja 4. Lokasi Satuan Kerja 5. Tanggal Posting 6. Nomor Dokumen 7. Nomor Dokumen Awal 8. Mata Anggaran 9. Penerimaan/Keluaran 10. Nomor Invoice/Tagihan 11. Kode Jenis Dokumen 12. Tanggal Tagihan 13. Uraian Tagihan 14. Kode Mata Uang Asing	Data SP2D KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Harian (disampaikan hari berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		15. Nilai Tukar Mata Uang Asing 16. Tanggal Tukar Mata Uang Asing 17. Nama Rekanan 18. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Rekanan					
		III. Data Pegawai Negeri Sipil Pusat, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Satker 2. Kode Satker 3. Nama anak Satker 4. Kode anak Satker 5. NIP pegawai 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pegawai 7. Nama pegawai 8. Alamat pegawai 9. Tanggal lahir 10. Jenis kelamin 11. Kedudukan 12. Gaji pokok 13. Status kawin 14. Status pegawai 15. Golongan	Contoh: Tugas Belajar/Aktif/MPP PNS atau CPNS	Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		16. Masa kerja tahun 17. Jabatan 18. Tunjangan terpencil 19. Tunjangan Papua 20. Kode hakim 21. Pendidikan 22. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) golongan 23. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) kenaikan gaji berkala 24. <i>Grade</i> remunerasi 25. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS	Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak				
3	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan	I. Data Pemberitahuan Pabean Impor dan perubahannya	Informasi nama dan alamat pengirim dan penerima barang, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jenis kuantitas barang serta perusahaan pengirim, nilai impor dan jumlah pajak- pajak yang dikeluarkan	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(2)	(3)	Rincian Jenis Data dan Informasi	(4)	Deskripsi	(5)	Bentuk Data	(6)	Cara Penyampaian	(7)	Penyampaian Pertama Kali	(8)	Jadwal Penyampaian
			II. Data Pengenaan Cukai Terhadap Barang Kena Cukai		(4)	Informasi nama dan alamat pengirim dan penerima barang, jenis, kuantitas dan grade barang serta perusahaan pengirim	Elektronik	Elektronik	Online	Online	1 Mei 2013	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)	
			III. Data Pengusaha Kawasan Berikat		(4)	Informasi pemilik, lokasi, luas areal, dan pengguna/penyewa kawasan berikat	Elektronik	Elektronik	Online	Online	1 Mei 2013	1 Mei 2013	Semesteran (paling lambat minggu kedua bulan Januari dan Juli)	
			IV. Data Barang Kiriman Melalui Pengusaha Jasa Titipan Yang Dilakukan Pemeriksaan Pabean Cukai		(4)	Informasi pengirim dan penerima barang serta alamatnya, jenis, jumlah dan kuantitas barang, perusahaan jasa pengirim barang	Elektronik	Elektronik	Online	Online	1 Mei 2013	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)	
			V. Data Pencapaian Penerimaan Pajak Yang Dihimpun DJBC		(4)	Informasi pencapaian penerimaan bea masuk, cukai, PPN impor, PPh 22 Impor, dan PPN HT	Elektronik	Elektronik	Online	Online	1 Mei 2013	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)	
			VI. Data Pemberitahuan Pabean Ekspor dan perubahannya		(4)	Informasi nama dan alamat pengirim dan penerima barang, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jenis kuantitas barang, dan nilai ekspor	Elektronik	Elektronik	Online	Online	1 Mei 2013	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)	

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VII. Data Pemberitahuan Pabean Untuk Tempat Penimbunan Berikat	Data Pemberitahuan Pabean untuk tempat penimbunan berikat	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
		VIII. Data Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI)	Data Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI)	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
		IX. Data Penagihan Pajak dalam Rangka Pelunasan Cukai (STCK-3)	Data Penagihan Pajak dalam Rangka Pelunasan Cukai (STCK-3)	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Semesteran (disampaikan pada bulan Januari dan bulan Juli)
		X. Data Nomor Identitas Kepabeanan	Data Nomor Identitas Kepabeanan	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
		XI. Data Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai	Data Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XII. Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP-PJKI)	Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP-PJKI)	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
		XIII. Nomor Identitas Kepabeanan dan Cukai Lainnya	Nomor Identitas Kepabeanan dan Cukai Lainnya	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
		XIV. Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan	Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
		XV. Elemen data tertentu dari <i>Outward Manifest</i> dan <i>Inward Manifest</i>	Elemen data tertentu dari <i>Outward Manifest</i> dan <i>Inward Manifest</i>	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
		XVI. CK-2 (Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai)	CK-2 (Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai)	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XVII. CK-3 (Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai)	CK-3 (Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai)	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
		XVIII. Elemen data tertentu dari Sistem Aplikasi Tempat Pembunyan Sementara	Elemen data tertentu dari Sistem Aplikasi Tempat Pembunyan Sementara <i>Online</i>	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
		XIX. CK-4A (Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai dibuat Etil Alkohol)	CK-4A (Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai dibuat Etil Alkohol)	Elektronik	<i>Online</i>	10 Februari 2018 (Untuk data mulai tahun pajak 2016)	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
		XX. CK-4B (Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai dibuat Minuman yang Mengandung Etil Alkohol)	CK-4B (Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai dibuat Minuman yang Mengandung Etil Alkohol)	Elektronik	<i>Online</i>	10 Februari 2018 (Untuk data mulai tahun pajak 2016)	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
		XXI. CK-4C (Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai dibuat Hasil Tembaku)	CK-4C (Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai dibuat Hasil Tembaku)	Elektronik	<i>Online</i>	10 Februari 2018 (Untuk data mulai tahun pajak 2016)	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XXII. CK-5 (Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC))	CK-5 (Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC))	Elektronik	Online	10 Februari 2018 (Untuk data mulai tahun pajak 2016)	Bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
		XXIII. CK-6 (Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol yang Sudah Dilunasi Cukainya di Peredaran Bebas)	CK-6 (Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol yang Sudah Dilunasi Cukainya di Peredaran Bebas)	Elektronik	Online	10 Februari 2018 (Untuk data mulai tahun pajak 2016)	Bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
4	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan	I. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan II. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya	Rencana belanja yang akan dilakukan oleh masing-masing daerah dalam tahun berjalan per organisasi/satuan kerja per jenis belanja Realisasi belanja yang dilakukan oleh masing-masing daerah per jenis belanja (bukan satuan kerja)	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Tahunan (paling lambat minggu kedua bulan Juli) Tahunan (paling lambat minggu keempat bulan Oktober)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(2)	(3)	Rincian Jenis Data dan Informasi	(4)	Deskripsi	(5)	Bentuk Data	(6)	Cara Penyampaian	(7)	Penyampaian Pertama Kali	(8)	Jadwal Penyampaian
5	Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan	I. Proyeksi indikator ekonomi makro dan APBN (Deviasi antara realisasi indikator ekonomi makro dengan proyeksinya)	(4)	1. Informasi nilai deviasi proyeksi indikator ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SPN) 2. Informasi nilai deviasi proyeksi APBN (defisit ABN, penerimaan perpajakan, belanja K/L)	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Triwulanan (paling lambat akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember)	Online	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)	Tahunan (paling lambat minggu kedua bulan Mei)		
		II. Database Informasi BKF (Tinjauan perekonomian dan sektor keuangan terkini)		1. Informasi ekonomi makro terkini 2. Pendapatan negara 3. APBN 4. risiko fiskal 5. kerjasama internasional (jumlah kebijakan indonesia yang diadopsi dalam kerjasama internasional)	Elektronik	Online	1 Mei 2013		Online	1 Mei 2013				
		III. Kajian yang berkaitan dengan perpajakan		Informasi Laporan kajian model proyeksi penerimaan perpajakan, peraturan perpajakan, penerapan peraturan perpajakan	Elektronik	Online	1 Mei 2013		Online	1 Mei 2013				

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(2)	(3)	Rincian Jenis Data dan Informasi	(4)	Deskripsi	(5)	Bentuk Data	(6)	Cara Penyampaian	(7)	Penyampaian Pertama Kali	(8)	Jadwal Penyampaian
6	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	I. Data realisasi pelayanan barang ekspor-impor dengan menggunakan peti kemas, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor kontainer 2. Kode Kapal 3. Nama Kapal 4. <i>Voyage Number</i> 5. Kegiatan 6. Status kontainer 7. Nomor PEB/PIB 8. Tanggal PEB/PIB 9. Tanggal Muat/Bongkar 10. Pelabuhan Asal Peti Kemas 11. Pelabuhan Tujuan Peti Kemas 12. Kode Pelangan 13. Tanggal Kedatangan Kapal 14. Tanggal Keberangkatan Kapal	(4)	Data kegiatan yang dilakukan oleh PT Pelindo I (Persero) Master Kapal <i>Primary Key</i> Ekspor/Impor <i>Full/ Empty</i> Lebih dikenal oleh PT Pelindo sebagai NPE/SPPB Master Pelangan untuk pelayanan barang dengan menggunakan kontainer	(5)	Elektronik	(6)	Online	(7)	1 Mei 2013	(8)	Bulan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)	Jadwal Penyampaian	

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		15. Nomor Faktur Pajak 16. Tanggal Faktur Pajak 17. Satuan Mata Uang 18. Nilai Tagihan	Nomor Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan Tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan				
		II. Data realisasi pelayanan barang ekspor-impor non-peti kemas, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Permohonan Pelayanan/Order Bongkar Muat 2. Kode Kapal 3. Nama Kapal 4. <i>Voyage Number</i> 5. Kegiatan 6. Tanggal Selesai Muat 7. Tanggal Selesai Bongkar 8. Nomor <i>Bill of Lading/Delivery Order</i> 9. Nama Barang 10. Volume Muat	Data kegiatan yang dilakukan oleh PT Pelindo I <i>Primary Key</i> Master Kapal Ekspor/Impor Master Barang	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11. Volume Bongkar 12. Pelabuhan Asal Barang 13. Pelabuhan Tujuan Barang 14. Kode Pelanggan 15. Tanggal Kedatangan Kapal 16. Tanggal Keberangkatan Kapal 17. Nomor Faktur Pajak 18. Tanggal Faktur Pajak 19. Satuan Mata Uang	Master Pelanggan untuk pelayanan barang dengan menggunakan kontainer Nomor Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan Tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan				
		III. Data dan Informasi Realisasi Pelayanan Kapal, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Permohonan Pelayanan/Order Pelayanan Kapal 2. Kode Kapal	<i>Primary Key</i>	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nama Kapal 4. Kode Agen Pelayaran 5. <i>Voyage Number</i> 6. Jenis Pelayaran 7. Pelabuhan Asal 8. Pelabuhan Tujuan 9. Tanggal Mulai Labuh 10. Tanggal Selesai Labuh 11. Aktual Tanggal Pandu Naik 12. Aktual Tanggal Pandu Turun 13. Kode Dermaga 14. Tanggal Bongkar 15. Tanggal Muat 16. Nomor Faktur Pajak 17. Tanggal Faktur Pajak 18. Satuan Mata Uang	Internasional Tanggal meninggalkan pelabuhan Tanggal pandu naik pertama (<i>itd</i>) Tanggal pandu turun (<i>ortd</i>) Master Lokasi Tambat Hanya yang dilakukan di pelabuhan yang dikelola Pelindo Hanya yang dilakukan di pelabuhan yang dikelola Pelindo Nomor Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan Tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		19. Nilai Tagihan IV. Tabel Referensi Master Pelanggan, yang paling sedikit memuat: 1. Kode Pelanggan 2. Nama Pelanggan 3. Nomor Telepon Pelanggan 4. Nomor Faksimile Pelanggan 5. Alamat Pelanggan 6. Nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelanggan 7. <i>Contact Person</i> Pelanggan 8. Status Pelanggan		Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)
		V. Tabel Referensi Master Kapal, yang paling sedikit memuat: 1. Kode Kapal 2. Nama Kapal 3. Kode Pelanggan	Pelayaran, Perusahaan Bongkar Muat, Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Pemilik Barang Kode Agen Pelayaran	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Pelayaran 5. Bendera Kapal 6. Status Kepemilikan Kapal 7. <i>GT (Gross Tonnage)</i> 8. <i>DWT (Dead Weight Ton)</i> 9. <i>LOA (Length of All)</i>	Internasional <i>Owner, Charter, Agency</i>				
		VI. Tabel Referensi Master Tambat, yang paling sedikit memuat: 1. Kode Dermaga 2. Nama Dermaga 3. Status Dermaga	Dermaga Umum, Non Dermaga Umum	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)
7	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	I. Data realisasi pelayanan barang ekspor-impor dengan menggunakan peti kemas, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Kontainer 2. Kode Kapal 3. Nama Kapal 4. <i>Voyage Number</i> 5. Kegiatan	Data kegiatan yang dilakukan oleh PT Pelindo II (Persero) Master Kapal <i>Primary Key</i> Ekspor/Impor	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Status Kontainer 7. Nomor PEB/PIB 8. Tanggal PEB/PIB 9. Tanggal Muat/Bongkar 10. Pelabuhan Asal Peti Kemas 11. Pelabuhan Tujuan Peti Kemas 12. Kode Pelanggan 13. Tanggal Kedatangan Kapal 14. Tanggal Keberangkatan Kapal 15. Nomor Faktur Pajak 16. Tanggal Faktur Pajak 17. Satuan Mata Uang 18. Nilai Tagihan 19. Nomor Kontainer	<p><i>Full/ Empty</i> Lebih dikenal oleh PT Pelindo sebagai NPE/SPPB</p> <p>Master Pelanggan untuk pelayanan barang dengan menggunakan kontainer</p> <p>Nomor Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan Tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan</p>				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data realisasi pelayanan barang ekspor-impor non-peti kemas, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Permohonan Pelayanan/Order Bongkar Muat 2. Kode Kapal 3. Nama Kapal 4. <i>Voyage Number</i> 5. Kegiatan 6. Tanggal Selesai Muat 7. Tanggal Selesai Bongkar 8. Nomor <i>Bill of Lading/Delivery Order</i> 9. Nama Barang 10. Volume Muat 11. Volume Bongkar 12. Pelabuhan Asal Barang 13. Pelabuhan Tujuan Barang 14. Kode Pelanggan	Data kegiatan yang dilakukan oleh PT Pelindo II <i>Primary Key</i> Master Kapal Ekspor/Impor Master Barang	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		15. Tanggal Kedatangan Kapal 16. Tanggal Keberangkatan Kapal 17. Nomor Faktur Pajak 18. Tanggal Faktur Pajak 19. Satuan Mata Uang 20. Nilai Tagihan	Nomor Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan Tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan				
		III. Data dan Informasi Realisasi Pelayanan Kapal, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Permoohonan Pelayanan/Order Pelayanan Kapal 2. Kode Kapal 3. Nama Kapal 4. Kode Agen Pelayaran 5. <i>Voyage Number</i> 6. Jenis Pelayaran 7. Pelabuhan Asal 8. Pelabuhan Tujuan 9. Tanggal Mulai Labuh	<i>Primary Key</i> Internasional	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		10. Tanggal Selesai Labuh 11. Aktual Tanggal Pandu Naik 12. Aktual Tanggal Pandu Turun 13. Kode Dermaga 14. Tanggal Bongkar 15. Tanggal Muat 16. Nomor Faktur Pajak 17. Tanggal Faktur Pajak 18. Satuan Mata Uang 19. Nilai Tagihan	Tanggal meniggalkan pelabuhan Tanggal pandu naik pertama (<i>in</i>) Tanggal pandu turun (<i>out</i>) Master Lokasi Tambat Hanya yang dilakukan di pelabuhan yang dikelola Pelindo Hanya yang dilakukan di pelabuhan yang dikelola Pelindo Nomor Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan Tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan				
		IV. Tabel Referensi Master Pelanggan, yang paling sedikit memuat: 1. Kode Pelanggan 2. Nama Pelanggan		Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nomor Telepon Pelanggan 4. Nomor Faksimile Pelanggan 5. Alamat Pelanggan 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelanggan 7. <i>Contact Person</i> Pelanggan 8. Status Pelanggan	Pelayaran, Perusahaan Bongkar Muat, Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Pemilik Barang				
		V. Tabel Referensi Master Kapal, yang paling sedikit memuat: 1. Kode Kapal 2. Nama Kapal 3. Kode Pelanggan 4. Pelayaran 5. Bendera Kapal 6. Status Kepemilikan Kapal 7. <i>GT (Gross Tonnage)</i> 8. <i>DWT (Dead Weight Ton)</i> 9. <i>LOA (Length of All)</i>	Kode Agen Pelayaran Internasional <i>Owner, Charter, Agency</i>	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	VI. Tabel Referensi Master Tambat, yang paling sedikit memuat: 1. Kode Dermaga 2. Nama Dermaga 3. Status Dermaga I. Data realisasi pelayanan barang ekspor-impor dengan menggunakan peti kemas, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Kontainer 2. Kode Kapal 3. Nama Kapal 4. <i>Voyage Number</i> 5. Kegiatan 6. Status Kontainer 7. Nomor PEB/PIB 8. Tanggal PEB/PIB 9. Tanggal Muat/Bongkar 10. Pelabuhan Asal Peti Kemas 11. Pelabuhan Tujuan Peti Kemas	Dermaga Umum, Non Dermaga Umum Data kegiatan yang dilakukan oleh PT Pelindo III (Persero) Master Kapal <i>Primary Key</i> Ekspor/Impor <i>Full/ Empty</i> Lebih dikenal oleh PT Pelindo sebagai NPE/SPPB	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)
				Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	12. Kode Pelanggan 13. Tanggal Kedatangan Kapal 14. Tanggal Keberangkatan Kapal 15. Nomor Faktur Pajak 16. Tanggal Faktur Pajak 17. Satuan Mata Uang 18. Nilai Tagihan	Master Pelanggan untuk pelayanan barang dengan menggunakan kontainer Nomor Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan Tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan	(5)	(6)	(7)	(8)	
	II. Data realisasi pelayanan barang ekspor-impor non-peti kemas, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Permohonan Pelayanan/Order Bongkar Muat 2. Kode Kapal 3. Nama Kapal 4. <i>Voyage Number</i> 5. Kegiatan 6. Tanggal Selesai Muat	Data kegiatan yang dilakukan oleh PT Pelindo III <i>Primary Key</i> Master Kapal Ekspor/Impor	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)	

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Tanggal Selesai Bongkar 8. Nomor <i>Bill of Lading/Delivery Order</i> 9. Nama Barang 10. Volume Muat 11. Volume Bongkar 12. Pelabuhan Asal Barang 13. Pelabuhan Tujuan Barang 14. Kode Pelanggan 15. Tanggal Kedatangan Kapal 16. Tanggal Keberangkatan Kapal 17. Nomor Faktur Pajak 18. Tanggal Faktur Pajak 19. Satuan Mata Uang 20. Nilai Tagihan	Master Barang Master Pelanggan untuk pelayanan barang dengan menggunakan kontainer Nomor Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan Tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>III. Data dan Informasi Realisasi Pelayanan Kapal, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Permohonan Pelayanan/ Pemesanan Pelayanan Kapal 2. Kode Kapal 3. Nama Kapal 4. Kode Agen Pelayaran 5. <i>Voyage Number</i> 6. Jenis Pelayaran 7. Pelabuhan Asal 8. Pelabuhan Tujuan 9. Tanggal Mulai Labuh 10. Tanggal Selesai Labuh 11. Aktual Tanggal Pandu Naik 12. Aktual Tanggal Pandu Turun 13. Kode Dermaga 14. Tanggal Bongkar 	<p><i>Primary Key</i></p> <p>Internasional</p> <p>Tanggal meninggalkan pelabuhan Tanggal pandu naik pertama (<i>in</i>) Tanggal pandu turun (<i>out</i>)</p> <p>Master Lokasi Tambat Hanya yang dilakukan di pelabuhan yang dikelola Pelindo</p>	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		15. Tanggal Muat 16. Nomor Faktur Pajak 17. Tanggal Faktur Pajak 18. Satuan Mata Uang 19. Nilai Tagihan IV. Tabel Referensi Master Pelanggan, yang paling sedikit memuat: 1. Kode Pelanggan 2. Nama Pelanggan 3. Nomor Telepon Pelanggan 4. Nomor Faksimile Pelanggan 5. Alamat Pelanggan 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelanggan 7. <i>Contact Person</i> Pelanggan	Hanya yang dilakukan di pelabuhan yang dikelola Pelindo Nomor Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan Tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Status Pelanggan	Pelayaran, Perusahaan Bongkar Muat, Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Pemilik Barang				
		V. Tabel Referensi Master Kapal, yang paling sedikit memuat: 1. Kode Kapal 2. Nama Kapal 3. Kode Pelangan 4. Pelayaran 5. Bendera Kapal 6. Status Kepemilikan Kapal 7. <i>GT (Gross Tonnage)</i> 8. <i>DWT (Dead Weight Ton)</i> 9. <i>LOA (Length of All)</i>	Kode Agen Pelayaran Internasional <i>Owner, Charter, Agency</i>	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)
		VI. Tabel Referensi Master Tambat, yang paling sedikit memuat: 1. Kode Dermaga 2. Nama Dermaga 3. Status Dermaga	Dermaga Umum, Non Dermaga Umum	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

(1) No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(2) (3) Rincian Jenis Data dan Informasi	(4) Deskripsi	(5) Bentuk Data	(6) Cara Penyampaian	(7) Penyampaian Pertama Kali	(8) Jadwal Penyampaian
9	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	I. Data realisasi pelayanan barang ekspor-impor dengan menggunakan peti kemas, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Kontainer 2. Kode Kapal 3. Nama Kapal 4. <i>Voyage Number</i> 5. Kegiatan 6. Status Kontainer 7. Nomor PEB/PIB 8. Tanggal PEB/PIB 9. Tanggal Muat/Bongkar 10. Pelabuhan Asal Peti Kemas 11. Pelabuhan Tujuan Peti Kemas 12. Kode Pelangan 13. Tanggal Kedatangan Kapal 14. Tanggal Keberangkatan Kapal	Data kegiatan yang dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) Master Kapal <i>Primary Key</i> Ekspor/Impor <i>Full/ Empty</i> Lebih dikenal oleh PT Pelindo sebagai NPE/SPPB Master Pelangan untuk pelayanan barang dengan menggunakan kontainer	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		15. Nomor Faktur Pajak 16. Tanggal Faktur Pajak 17. Satuan Mata Uang 18. Nilai Tagihan	Nomor Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan Tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan				
		II. Data realisasi pelayanan barang ekspor-impor non- peti kemas, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Permohonan Pelayanan/Pemesanan Bongkar Muat 2. Kode Kapal 3. Nama Kapal 4. <i>Voyage Number</i> 5. Kegiatan 6. Tanggal Selesai Muat 7. Tanggal Selesai Bongkar 8. Nomor <i>Bill of</i> <i>Lading/Delivery Order</i> 9. Nama Barang 10. Volume Muat	Data kegiatan yang dilakukan oleh PT Pelindo IV <i>Primary Key</i> Master Kapal Ekspor/Impor Master Barang	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11. Volume Bongkar 12. Pelabuhan Asal Barang 13. Pelabuhan Tujuan Barang 14. Kode Pelanggan 15. Tanggal Kedatangan Kapal 16. Tanggal Keberangkatan Kapal 17. Nomor Faktur Pajak 18. Tanggal Faktur Pajak 19. Satuan Mata Uang 20. Nilai Tagihan	Master Pelanggan untuk pelayanan barang dengan menggunakan kontainer Nomor Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan Tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan				
	III. Data dan Informasi Realisasi Pelayanan Kapal, yang paling sedikit memuat:			Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Permohonan Pelayanan/Order Pelayanan Kapal 2. Kode Kapal 3. Nama Kapal 4. Kode Agen Pelayaran 5. <i>Voyage Number</i> 6. Jenis Pelayaran 7. Pelabuhan Asal 8. Pelabuhan Tujuan 9. Tanggal Mulai Labuh 10. Tanggal Selesai Labuh 11. Aktual Tanggal Pandu Naik 12. Aktual Tanggal Pandu Turun 13. Kode Dermaga 14. Tanggal Bongkar 15. Tanggal Muat 16. Nomor Faktur Pajak 	<p><i>Primary Key</i></p> <p>Internasional</p> <p>Tanggal meninggalkan pelabuhan Tanggal pandu naik pertama (<i>in</i>) Tanggal pandu turun (<i>out</i>)</p> <p>Master Lokasi Tambat Hanya yang dilakukan di pelabuhan yang dikelola Pelindo Hanya yang dilakukan di pelabuhan yang dikelola Pelindo Nomor Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan</p>				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		17. Tanggal Faktur Pajak 18. Satuan Mata Uang 19. Nilai Tagihan	Tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pelindo kepada pelanggan				
		IV. Tabel Referensi Master Pelanggan, yang paling sedikit memuat: 1. Kode Pelanggan 2. Nama Pelanggan 3. Nomor Telp Pelanggan 4. Nomor Faksimile Pelanggan 5. Alamat Pelanggan 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelanggan 7. <i>Contact Person</i> Pelanggan 8. Status Pelanggan	Pelayaran, Perusahaan Bongkar Muat, Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Pemilik Barang	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		V. Tabel Referensi Master Kapal, yang paling sedikit memuat: 1. Kode Kapal 2. Nama Kapal 3. Kode Pelanggan 4. Pelayaran 5. Bendera Kapal 6. Status Kepemilikan Kapal 7. <i>GT (Gross Tonnage)</i> 8. <i>DWT (Dead Weight Ton)</i> 9. <i>LOA (Length of All)</i>	Kode Agen Pelayaran Internasional <i>Owner, Charter, Agency</i>	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)
10	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	VI. Tabel Referensi Master Tambat, yang paling sedikit memuat: 1. Kode Dermaga 2. Nama Dermaga 3. Status Dermaga I. Data Izin Prinsip Penanaman Modal, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan	Dermaga Umum, Non Dermaga Umum Izin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Alamat Perusahaan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Perumahan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi					
		II. Data Izin Usaha untuk berbagai Sektor Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Perumahan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek	Adalah izin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11. Valuta 12. Nilai Investasi					
		III. Data Izin Usaha Perluasan untuk berbagai Sektor Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Permohonan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi	Izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)
		IV. Data Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang paling sedikit memuat:	Izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Perumahan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi 					
		<p>V. Data Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 	Izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Jenis Permohonan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi					
		VI. Data Izin Usaha Perubahan untuk berbagai Sektor Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Permohonan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi	Izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VII. Data Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai Sektor Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Perumahan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi	Izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)
		VIII. Data Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin	Persetujuan Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Identitas/jenis mesin 7. Nilai legalisasi					
11	Kementerian Dalam Negeri	IX. Data Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Jenis barang dan bahan 7. Kuantitas/Nilai Barang dan Bahan Data Kependudukan dalam bentuk Data Penduduk Potensial Wajib Pajak, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor induk kependudukan 2. Nomor Kartu Keluarga	Persetujuan Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya) Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	3. Nama 4. Tempat lahir 5. Tanggal lahir 6. Jenis kelamin 7. Status perkawinan 8. Status hubungan dalam keluarga 9. Jenis pekerjaan 10. Alamat I. Data Penseertifikatan Tanah yang terdiri dari Pendaftaran Tanah Pertama Kali maupun Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah II. Data Pemberian Hak Pakai atas Tanah serta Persetujuan Perpanjangan Hak-nya III. Data Pemberian Hak Guna Bangunan serta Persetujuan Perpanjangan Hak-nya	Informasi nama, alamat pemilik, letak tanah, NIB, luas tanah, Nomor Hak, tahun sertifikat dan Jenis Hak Informasi nama, letak tanah, alamat pemberi dan penerima hak, alamat, luas, tahun sertifikat dan peruntukan tanah Informasi nama, letak tanah, alamat pemberi dan penerima hak, tahun sertifikat, alamat dan luas bangunan	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)
				Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)
				Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	I. Laporan Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal, yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan 2. Nama Kapal 3. Ukuran Kapal 4. Bendera Kapal 5. Pelabuhan Asal 6. Tanggal Kedatangan 7. Pelabuhan Tujuan 8. Tanggal Keberangkatan 9. Bongkar/Muat 10. Ekspor/Impor 11. Jenis Muatan 12. Tonase 13. Nama Perusahaan Bongkar Muat II. Data Pelabuhan di seluruh Indonesia	Laporan bulanan yang menunjukkan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal yang dilaporkan oleh Otoritas Pelabuhan Utama/KSOP/Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Elektronik	Online	1 September 2013 (Data Januari s.d Juli 2013)	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
			Data seluruh pelabuhan di Indonesia di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		III. Data Surat Izin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor SIUPAL 2. Tanggal SIUPAL 3. Nama Perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 5. Alamat Domisili 6. Nama Penanggung Jawab 7. Alamat Penanggung jawab		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (data tahun 2001 s.d. Oktober 2014)	Tahunan (bulan Februari tahun berikutnya)
		IV. Data Surat Izin Operasi Perusahaan Angkatan Laut Khusus (SIOPSUS), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor SIOPSUS 2. Tanggal SIOPSUS 3. Nama Perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 5. Alamat Domisili		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (data tahun 2001 s.d. Oktober 2014)	Tahunan (bulan Februari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Nama Penanggung Jawab 7. Alamat Penanggung jawab V. Data Surat Izin Usaha Keagenan Awak Kapal, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 5. Alamat Perusahaan 6. Masa Berlaku 7. Nama Penanggung jawab 8. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab VI. Pendaftaran Hak Milik Kapal, yang paling sedikit memuat: 1. Nama kapal 2. Nama kapal sebelumnya		Elektronik	Langsung (<i>email</i>)	1 Desember 2014 (data mulai Januari 2014 s.d. Oktober 2014)	Tahunan (bulan Februari tahun berikutnya)
				Elektronik	Langsung (<i>email</i>)	1 Desember 2014 (data mulai Januari 2014 s.d. Oktober 2014)	Tahunan (bulan Februari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Bank Indonesia	3. <i>Gross Tonnage/Net Tonnage</i> kapal 4. Jenis kapal 5. Tempat pendaftaran kapal 6. Tanggal pendaftaran 7. Tanda pendaftaran 8. Nama pemilik 9. Alamat/Kedudukan pemilik 10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik		Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya)
		1. Informasi Debitur, yang paling sedikit memuat: 1. Identitas Debitur 2. Identitas Pengurus dan Pemilik, bagi Debitur yang berbentuk badan usaha 3. Agunan/Penjamin 4. Laporan Keuangan Debitur					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5. Fasilitas Penyediaan Dana	Merupakan proses pengisian Laporan Debitur atas setiap fasilitas yang diberikan Bank Pelapor kepada Debitur. Fasilitas-fasilitas tersebut mencakup: Penempatan pada bank lain, Surat Berharga, Kredit, Tagihan Lainnya, Penyertaan dan Penerusan kredit (kredit kelolaan)	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)	
	II. Informasi Devisa Hasil Ekspor, yang paling sedikit memuat: 1. Kode Kantor Bea Cukai 2. Nomor Pendaftaran PEB 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 15 Digit 4. Nama Eksportir (pada Dokumen PEB) 5. Valuta dari FOB ASLI 6. Nilai FOB sesuai dengan valas yang tercantum dalam PEB						

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Nilai FOB ASLI yang dikonversi ke dalam USD dengan kurs tengah BI hari kerja terakhir pada akhir bulan PEB 8. Tanggal Pendaftaran PEB 9. Nilai DHE dalam <i>original currency</i> 10. Nilai DHE setelah dikonversi ke USD dengan kurs tengah BI hari kerja terakhir pada akhir bulan PEB 11. Negara Tujuan 12. Komiditi dengan nilai yang terbesar 13. Valuta DHE pembayaran terakhir 14. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima DHE 15. Nama Penerima DHE 16. <i>Standard International Trade Classification</i>					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)	17. Periode bulan diterimanya DHE pada laporan RTE ke Bank Devisa (<i>incoming</i> yang paling akhir) 18. Periode tahun diterimanya DHE pada laporan RTE ke Bank Devisa (<i>incoming</i> yang paling akhir) I. Data produksi kendaraan bermotor, yang paling sedikit memuat: 1. Bulan produksi 2. Kategori 3. Subkategori 4. Merek 5. Model 6. Jumlah produksi	Data produksi yang dilakukan oleh produsen kendaraan bermotor yang tergabung dalam GAIKINDO Sedan, 4x2, 4x4, Bus, Pick Up/Truk dan Double Cabin 4x2/4x4 Berdasarkan kapasitas silinder mesin (Non Bus)/Tonase(Bus) Hanya sampai penamaan model utama, tidak sampai ke varian Dalam Unit	Elektronik	Secara langsung (Melalui <i>email</i> dalam bentuk <i>Microsoft Excel</i>)	31 Juli 2013 (periode pelaporan Januari s.d. Juni 2013)	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juli dan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data penjualan lokal kendaraan bermotor, yang paling sedikit memuat: 1. Bulan penjualan 2. Kategori 3. Subkategori 4. Merek 5. Model 6. Jumlah penjualan	Data produksi yang dilakukan oleh produsen kendaraan bermotor yang tergabung dalam GAIKINDO Sedan, 4x2, 4x4, Bus, Pick Up/Truk dan Double Cabin 4x2/4x4 Berdasarkan kapasitas silinder mesin (Non Bus)/Tonase(Bus) Hanya sampai penamaan model utama, tidak sampai ke varian Dalam Unit	Elektronik	Secara langsung (Melalui email dalam bentuk Microsoft Excel)	31 Juli 2013 (periode pelaporan Januari s.d. Juni 2013)	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juli dan Januari)
		III. Data penjualan ekspor CBU kendaraan bermotor, yang paling sedikit memuat: 1. Bulan penjualan 2. Kategori	Data produksi yang dilakukan oleh produsen kendaraan bermotor yang tergabung dalam GAIKINDO Sedan, 4x2, 4x4, Bus, Pick Up/Truk dan Double Cabin 4x2/4x4	Elektronik	Secara langsung (Melalui email dalam bentuk Microsoft Excel)	31 Juli 2013 (periode pelaporan Januari s.d. Juni 2013)	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juli dan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Subkategori 4. Merek 5. Model 6. Jumlah penjualan	Berdasarkan kapasitas silinder mesin (Non Bus)/Tonase(Bus) Hanya sampai penamaan model utama, tidak sampai ke varian Dalam Unit				
		IV. Data penjualan ekspor CKD kendaraan bermotor, yang paling sedikit memuat: 1. Bulan penjualan 2. Kategori 3. Subkategori 4. Merek 5. Model 6. Jumlah penjualan	Data produksi yang dilakukan oleh produsen kendaraan bermotor yang tergabung dalam GAIKINDO Sedan, 4x2, 4x4, Bus, Pick Up/Truk dan Double Cabin 4x2/4x4 Berdasarkan kapasitas silinder mesin (Non Bus)/Tonase(Bus) Hanya sampai penamaan model utama, tidak sampai ke varian Dalam Set	Elektronik	Secara langsung (Melalui email dalam bentuk Microsoft Excel)	31 Juli 2013 (periode pelaporan Januari s.d. Juni 2013)	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juli dan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		V. Data penjualan ekspor komponen, yang paling sedikit memuat: 1. Bulan penjualan 2. Merek 3. Jumlah penjualan	Data produksi yang dilakukan oleh produsen kendaraan bermotor yang tergabung dalam GAIKINDO Dalam <i>pieces</i>	Elektronik	Secara langsung (Melalui <i>email</i> dalam bentuk <i>Microsoft Excel</i>)	31 Juli 2013 (periode pelaporan Januari s.d. Juni 2013)	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juli dan Januari)
		VI. Data impor <i>CBU</i> kendaraan bermotor, yang paling sedikit memuat: 1. Bulan impor 2. Kategori 3. Subkategori 4. Merek 5. Model 6. Jumlah penjualan	Data produksi yang dilakukan oleh produsen kendaraan bermotor yang tergabung dalam GAIKINDO Sedan, 4x2, 4x4, <i>Bus</i> , <i>Pick Up/Truk</i> dan <i>Double Cabin</i> 4x2/4x4 Berdasarkan kapasitas silinder mesin (Non Bus)/Tonase(Bus) Hanya sampai penamaan model utama, tidak sampai ke varian Dalam Unit	Elektronik	Secara langsung (Melalui <i>email</i> dalam bentuk <i>Microsoft Excel</i>)	31 Juli 2013 (periode pelaporan Januari s.d. Juni 2013)	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juli dan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)	<p>I. Data produksi sepeda motor, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bulan produksi 2. Model 3. Merek 4. Jumlah produksi <p>II. Data distribusi domestik sepeda motor, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bulan distribusi 2. Model 3. Merek 4. Jumlah distribusi <p>III. Data distribusi ekspor sepeda motor, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bulan distribusi 2. Model 3. Merek 4. Jumlah distribusi 	<p>Data produksi yang dilakukan oleh produsen sepeda motor yang tergabung dalam AISI</p> <p><i>Underbone/ Sport/ Scooter</i></p> <p>Dalam Unit</p> <p>Data produksi yang dilakukan oleh produsen sepeda motor yang tergabung dalam AISI</p> <p><i>Underbone/ Sport/ Scooter</i></p> <p>Dalam Unit</p> <p>Data produksi yang dilakukan oleh produsen sepeda motor yang tergabung dalam AISI</p> <p><i>Underbone/ Sport/ Scooter</i></p> <p>Dalam Unit</p>	Elektronik	Secara langsung (Melalui <i>email</i> dalam bentuk <i>Microsoft Excel</i>)	31 Juli 2013 (periode pelaporan Januari s.d. Juni 2013)	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)
				Elektronik	Secara langsung (Melalui <i>email</i> dalam bentuk <i>Microsoft Excel</i>)	31 Juli 2013 (periode pelaporan Januari s.d. Juni 2013)	Bulanan (paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	Kementerian Perdagangan	<p>I. Data Profil Pelaku Perizinan Ekspor-Impor di Kementerian Perdagangan RI, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Perizinan 2. Nomor izin 3. Tanggal izin 4. Nama Perusahaan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 6. Alamat Perusahaan 7. Penanggung Jawab 8. Negara asal/tujuan 9. Uraian barang 10. Jumlah barang <p>II. Data Surat Keterangan Asal (SKA), yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor SKA 2. Tanggal SKA 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan 5. Alamat perusahaan 	Data ini merupakan profil pelaku untuk seluruh kegiatan perizinan: <ol style="list-style-type: none"> 1. eksportir terdaftar, 2. persetujuan ekspor 3. Importir terdaftar 4. Persetujuan impor 	Elektronik	Online	1 Agustus 2013	Bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
				Elektronik	Online	1 Agustus 2013	Bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Negara tujuan 7. Uraian barang 8. Volume barang 9. Nilai barang III. Data Angka Pengenal Importir (API), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor API 2. Tanggal API 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan 5. Alamat perusahaan 6. Nomor akta pendirian/Notaris 7. Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 8. Referensi Bank Devisa 9. Jenis barang/jasa 10. Surat Izin Usaha Perdagangan/izin usaha lain yang sejenis		Elektronik	Online	1 Agustus 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(2)	(3)	Rincian Jenis Data dan Informasi	(4)	Deskripsi	(5)	Bentuk Data	(6)	Cara Penyampaian	(7)	Penyampaian Pertama Kali	(8)	Jadwal Penyampaian
(1)		IV. Tanda Pendaftaran, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. Penanggung Jawab (tertera dalam Akta) 4. Keterangan lainnya a. Nama prinsipal (khusus untuk Surat Tanda Pendaftaran Agen/Distributor barang dan atau Jasa Produksi Dalam/Luar Negeri) b. Penerima Waralaba dan Merk Waralaba (khusus untuk Surat Tanda Pendaftaran Waralaba)	(3)	Rincian Jenis Data dan Informasi	(4)	Deskripsi	(5)	Bentuk Data	(6)	Cara Penyampaian	(7)	Penyampaian Pertama Kali	(8)	Jadwal Penyampaian
						Jenis tanda pendaftaran meliputi: a. Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan atau Jasa Produksi Dalam/Luar Negeri b. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba c. Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia	Elektronik		Online		10 Desember 2014		Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)	

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Asal barang (khusus pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia)					
		V. Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 1. Nama Perusahaan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Penanggung Jawab (tertera dalam Akta) 5. Modal dasar		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)
		VI. Data Izin Wakil Pialang Berjangka, yang memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin	Data ini merupakan izin untuk melakukan kegiatan sebagai wakil pialang berjangka	Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nama Wakil Pialang Berjangka 4. Nama Perusahaan Pialang Berjangka 5. Alamat wakil pialang berjangka 6. Lokasi/alamat penempatan kantor Wakil Pialang Berjangka 7. Nomor Induk Kependudukan (NIK) wakil pialang berjangka	Data ini merupakan izin untuk melakukan kegiatan sebagai pedagang berjangka	Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)
		VII. Data Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka, yang memuat: 1. Perseorangan a. Nomor Izin b. Tanggal Izin c. Nama pedagang berjangka d. Alamat pedagang berjangka					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Perusahaan a. Nomor Izin b. Tanggal Izin c. Nama pedagang berjangka d. Alamat pedagang berjangka e. Nomor telepon dan faksimile					
		VIII. Data Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI), yang memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Status Perusahaan (Produsen/Importir) 5. Penanggung jawab perusahaan 6. Nomor telepon/ faksimile/ email		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Data Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemotong 2. Tahun Pajak 3. Bulan Pajak 4. Jenis Transaksi 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Nama Wajib Pajak 7. Alamat Wajib Pajak 8. Tanggal Transaksi 9. Jumlah Kepemilikan 10. Jumlah Pajak 11. Nomor Induk Kependudukan 12. Nomor Paspor	Data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia	Elektronik	Secara langsung (melalui <i>email</i>)	1 Mei 2013	Harian (paling lambat satu hari kerja berikutnya)
19	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Data pengadaan barang/jasa pemerintah, yang paling sedikit memuat: 1. nama paket dan metode pemilihan pengadaan 2. jadwal pelaksanaan dan pemilihan pengadaan 3. jenis kontrak (<i>tumpsum/</i> harga satuan)	Data pengadaan barang/jasa pemerintah, baik yang secara elektronik yang terdapat pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), termasuk data <i>e-purchasing</i> , maupun data pengadaan yang di luar SPSE yang dikumpulkan oleh LKPP	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	PT Jakarta International Container Terminal (JICT)	4. Unit Layanan Pengadaan, Panitia Pengadaan atau Pejabat Pengadaan 5. nama peserta pengadaan 6. alamat peserta pengadaan 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) peserta pengadaan 8. pemenang pengadaan (penyedia barang/jasa yang ditunjuk) 9. harga perkiraan sendiri 10. nilai kontrak/ nilai pembelian Data Container Discharge/Loading Report (COARRI) dan Data Container Gate in Gate Out Report (CODECO), yang paling sedikit memuat: 1. Kode Dokumen 2. Kode TPS 3. Nama alat angkut 4. Nomor voyage/flight 5. Call Sign 6. Perkiraan Tanggal Tiba/Tanggal Perkiraan ekspor		Elektronik	Online	1 September 2013	Harian (paling lambat satu hari kerja berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Kode Gudang 8. Nomor Kontainer 9. Ukuran Kontainer 10. Nomor segel pelayaran 11. Jenis <i>Container Load</i> 12. Nomor <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> 13. Tanggal <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> 14. Nomor master <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> 15. Tanggal master <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> 16. Identitas pemilik barang/ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 17. Nama pemilik barang 18. Berat bruto barang 19. Nomor BC 1.1 (<i>manifest</i>) 20. Tanggal BC 1.1. (<i>manifest</i>) 21. Nomor pos dan Sub pos BC 1.1. 22. Asal kontainer 23. Seri kemasan 24. Kode kemasan 25. Jumlah kemasan 26. Kode posisi kontainer					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		27. Kode dokumen untuk pengeluaran/pemasukan barang 28. Nomor dokumen untuk pengeluaran/pemasukan barang 29. Waktu dokumen untuk pengeluaran/pemasukan barang 30. Nomor polisi sarana pengangkut dalam rangka pengeluaran/pemasukan barang 31. Status kontainer (kosong) 32. Kode ISO kontainer 33. Pelabuhan muat 34. Pelabuhan transit 35. Pelabuhan bongkar 36. Gudang tujuan 37. Kode kantor pelayanan Bea Cukai yang menerbitkan nomor dokumen pabean 38. Nomor pendaftaran Bea Cukai atas dokumen pabean 39. Tanggal pendaftaran atas dokumen pabean					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	PT Mustika Alam Lestari (MAL)	40. Nomor segel Bea Cukai (bila ada) 41. Tanggal segel Bea Cukai (bila ada) 42. Nomor dokumen pengeluaran/pemuatan yang diterbitkan oleh TPS 43. Tanggal dokumen pengeluaran/pemuatan yang diterbitkan oleh TPS Data <i>Container Discharge/</i> <i>Loading Report (COARR)</i> dan <i>Data Container Gate in Gate</i> <i>Out Report (CODECO)</i> , yang paling sedikit memuat: 1. Kode Dokumen 2. Kode TPS 3. Nama alat angkut 4. Nomor <i>voyage/flight</i> 5. Call Sign 6. Perkiraan Tanggal Tiba/ Tanggal Perkiraan ekspor 7. Kode Gudang 8. Nomor kontainer 9. Ukuran kontainer 10. Nomor segel pelayaran 11. Jenis <i>Container Load</i>		Elektronik	<i>Online</i>	1 September 2013	Harian (paling lambat satu hari kerja berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12. Nomor <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> 13. Tanggal <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> 14. Nomor master <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> 15. Tanggal master <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> 16. Identitas pemilik barang/ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 17. Nama pemilik barang 18. Berat bruto barang 19. Nomor BC 1.1 (<i>manifest</i>) 20. Tanggal BC 1.1. (<i>manifest</i>) 21. Nomor pos dan Sub pos BC 1.1. 22. Asal kontainer 23. Seri kemasan 24. Kode kemasan 25. Jumlah kemasan 26. Kode posisi kontainer 27. Kode dokumen untuk pengeluaran/pemasukan barang					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		28. Nomor dokumen untuk pengeluaran/pemasukan barang 29. Waktu dokumen untuk pengeluaran/pemasukan barang 30. Nomor polisi sarana pengangkut dalam rangka pengeluaran/ pemasukan barang 31. Status kontainer (kosong) 32. Kode ISO kontainer 33. Pelabuhan muat 34. Pelabuhan transit 35. Pelabuhan bongkar 36. Gudang tujuan 37. Kode kantor pelayanan Bea Cukai yang menerbitkan nomor dokumen pabean 38. Nomor pendaftaran Bea Cukai atas dokumen pabean 39. Tanggal pendaftaran atas dokumen pabean 40. Nomor segel Bea Cukai (bila ada)					

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	PT Terminal Peti Kemas Kojja	41. Tanggal segel Bea Cukai (bila ada) 42. Nomor dokumen pengeluaran/pemuatan yang diterbitkan oleh TPS 43. Tanggal dokumen pengeluaran/pemuatan yang diterbitkan oleh TPS Data <i>Container Discharge/ Loading Report</i> (COARRI) dan Data <i>Container Gate in Gate Out Report</i> (CODECO), yang paling sedikit memuat: 1. Kode Dokumen 2. Kode TPS 3. Nama alat angkut 4. Nomor <i>voyage/flight</i> 5. Call Sign 6. Perkiraan Tanggal Tiba/Tanggal Perkiraan ekspor 7. Kode Gudang 8. Nomor kontainer 9. Ukuran kontainer 10. Nomor segel pelayaran 11. Jenis <i>Container Load</i>		Elektronik	<i>Online</i>	1 September 2013	Harian (paling lambat satu hari kerja berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12. Nomor <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> 13. Tanggal <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> 14. Nomor master <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> 15. Tanggal master <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> 16. Identitas pemilik barang/ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 17. Nama pemilik barang 18. Berat bruto barang 19. Nomor BC 1.1 (<i>manifest</i>) 20. Tanggal BC 1.1. (<i>manifest</i>) 21. Nomor pos dan Sub pos BC 1.1. 22. Asal kontainer 23. Seri kemasan 24. Kode kemasan 25. Jumlah kemasan 26. Kode posisi kontainer 27. Kode dokumen untuk pengeluaran/pemasukan barang					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		28. Nomor dokumen untuk pengeluaran/pemasukan barang 29. Waktu dokumen untuk pengeluaran/pemasukan barang 30. Nomor polisi sarana pengangkut dalam rangka pengeluaran/ pemasukan barang 31. Status kontainer (kosong) 32. Kode ISO kontainer 33. Pelabuhan muat 34. Pelabuhan transit 35. Pelabuhan bongkar 36. Gudang tujuan 37. Kode kantor pelayanan Bea Cukai yang menerbitkan nomor dokumen pabean 38. Nomor pendaftaran Bea Cukai atas dokumen pabean 39. Tanggal pendaftaran atas dokumen pabean 40. Nomor segel Bea Cukai (bila ada)					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	PT Terminal Peti Kemas Surabaya	41. Tanggal segel Bea Cukai (bila ada) 42. Nomor dokumen pengeluaran/pemuatan yang diterbitkan oleh TPS 43. Tanggal dokumen pengeluaran/pemuatan yang diterbitkan oleh TPS Data <i>Container Discharge/ Loading Report</i> (COARR) dan Data <i>Container Gate in Gate Out Report</i> (CODECO), yang paling sedikit memuat: 1. Kode Dokumen 2. Kode TPS 3. Nama alat angkut 4. Nomor <i>voyage/flight</i> 5. Call Sign 6. Perkiraan Tanggal Tiba/ Tanggal Perkiraan ekspor 7. Kode Gudang 8. Nomor kontainer 9. Ukuran kontainer 10. Nomor segel pelayaran 11. Jenis <i>Container Load</i> 12. Nomor <i>Bill of Lading/ Airway Bill</i>		Elektronik	<i>Online</i>	1 September 2013	Harian (paling lambat satu hari kerja berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		13. Tanggal <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> 14. Nomor master <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> 15. Tanggal master <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> 16. Identitas pemilik barang/ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 17. Nama pemilik barang 18. Berat bruto barang 19. Nomor BC 1.1 (<i>manifest</i>) 20. Tanggal BC 1.1. (<i>manifest</i>) 21. Nomor pos dan Sub pos BC 1.1. 22. Asal kontainer 23. Seri kemasan 24. Kode kemasan 25. Jumlah kemasan 26. Kode posisi kontainer 27. Kode dokumen untuk pengeluaran/pemasukan barang 28. Nomor dokumen untuk pengeluaran/pemasukan barang					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		29. Waktu dokumen untuk pengeluaran/pemasukan barang 30. Nomor polisi sarana pengangkut dalam rangka pengeluaran/pemasukan barang 31. Status kontainer (kosong) 32. Kode ISO kontainer 33. Pelabuhan muat 34. Pelabuhan transit 35. Pelabuhan bongkar 36. Gudang tujuan 37. Kode kantor pelayanan Bea Cukai yang menerbitkan nomor dokumen pabean 38. Nomor pendaftaran Bea Cukai atas dokumen pabean 39. Tanggal pendaftaran atas dokumen pabean 40. Nomor segel Bea Cukai (bila ada) 41. Tanggal segel Bea Cukai (bila ada)					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan	42. Nomor dokumen pengeluaran/pemuatan yang diterbitkan oleh TPS 43. Tanggal dokumen pengeluaran/pemuatan yang diterbitkan oleh TPS	Data penyedia adalah daftar penyedia barang/jasa yang terdaftar pada SPSE Kementerian Keuangan.	Elektronik	Online	1 Juli 2013	Harian (paling lambat satu hari kerja berikutnya)
		I. Data identitas penyedia, yang paling sedikit memuat: 1. ID Penyedia 2. Nama 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Alamat 5. Telepon 6. Faksimile 7. Email 8. Tanggal terdaftar II. Data pemilik, yang paling sedikit memuat: 1. ID Penyedia 2. Nama Penyedia 3. Nama Pemilik 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemilik		Elektronik	Online	1 Juli 2013	Harian (paling lambat satu hari kerja berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Alamat Pemilik 6. Jumlah Lembar Saham III. Data pengurus, yang paling sedikit memuat: 1. ID Penyedia 2. Nama Penyedia 3. Nama Pengurus 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pengurus 5. Alamat Pengurus 6. Jabatan Pengurus 7. Tanggal awal 8. Tanggal akhir	Tanggal awal menjadi pengurus Tanggal akhir menjadi pengurus	Elektronik	Online	1 Juli 2013	Harian (paling lambat satu hari kerja berikutnya)
		IV. Data izin usaha, yang paling sedikit memuat: 1. ID Penyedia 2. Nama Penyedia 3. Kualifikasi Penyedia (Kecil/Non Kecil) 4. Nomor Izin Usaha 5. Tanggal Berlaku	Kriteria kualifikasi berdasarkan Surat Izin Usaha	Elektronik	Online	1 Juli 2013	Harian (paling lambat satu hari kerja berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Jenis Izin Usaha 7. Instansi Pemberi 8. Klasifikasi	Contoh : SIUP, SIUJK, dan lain-lain Contoh : Konstruksi, Perdagangan Umum, Konsultasi, dan lain-lain				
		V. Data tenaga ahli, yang paling sedikit memuat: 1. ID Penyedia 2. Nama Penyedia 3. Nama Tenaga Ahli 4. Tanggal Lahir 5. Alamat Tenaga Ahli 6. Pendidikan Terakhir 7. Pengalaman Kerja	Tenaga ahli yang dimiliki oleh penyedia	Elektronik	<i>Online</i>	1 Juli 2013	Harian (paling lambat satu hari kerja berikutnya)
		VI. Data pengalaman dan pekerjaan yang sedang berjalan, yang paling sedikit memuat: 1. ID Penyedia 2. Nama Penyedia 3. Pekerjaan 4. Lokasi Pekerjaan 5. Pemberi Pekerjaan 6. Alamat Pemberi Pekerjaan 7. Nomor Kontrak		Elektronik	<i>Online</i>	1 Juli 2013	Harian (paling lambat satu hari kerja berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Tanggal Kontrak 9. Tanggal Selesai Kontrak 10. Nilai Kontrak VII. Data Akta Perusahaan, yang paling sedikit memuat: 1. ID Penyedia 2. Nama Penyedia 3. Nomor Akta Pendirian 4. Tanggal Akta Pendirian 5. Nama Notaris Akta Pendirian 6. Nomor Akta Perubahan Terakhir 7. Tanggal Akta Perubahan Terakhir 8. Nama Notaris Akta Perubahan Terakhir		Elektronik	Online	1 Juli 2013	Harian (paling lambat satu hari kerja berikutnya)
		VIII. Data penawaran, yang paling sedikit memuat: 1. ID Penyedia 2. Nama Penyedia 3. Nama Paket 4. Pemilik Paket (Satuan Kerja)	Data penawaran untuk paket lelang yang telah selesai	Elektronik	Online	1 Juli 2013	Harian (paling lambat satu hari kerja berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Alamat pemilik paket 6. Nilai Paket (HPS) 7. Jenis Paket (Barang/Konsultansi/ Konstruksi/ Jasa Lainnya) 8. Tanggal Memasukkan Penawaran					
		IX. Data kontrak, yang paling sedikit memuat: 1. ID Penyedia 2. Nama penyedia Pemenang 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia pemenang 4. Nama paket 5. Pemilik Paket 6. Alamat pemilik paket 7. Nomor Kontrak 8. Tanggal kontrak mulai 9. Tanggal kontrak akhir 10. Nilai kontrak	Berisi data pemenang dari pengadaan secara elektronik	Elektronik	Online	1 Juli 2013	Harian (paling lambat satu hari kerja berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	I. Data Cadangan atas Minyak Bumi dan Gas Bumi Per wilayah II. Data Penjualan Ekspor dan Pembelian Impor kegiatan hilir III. Data daftar harga sumber daya energi	Informasi data cadangan terbukti atas minyak bumi dan gas bumi per wilayah Data ekspor dan impor per jenis produk kilang Informasi harga sumber daya energi berdasarkan tipenya (<i>Indonesia Crude Price</i>) Data tahunan kontrak migas aktif yang memuat data wilayah kerja migas	Elektronik Elektronik Elektronik	Langsung Langsung Langsung	1 Desember 2013 1 Desember 2013 1 Desember 2013	Tahunan (setiap akhir bulan April tahun berikutnya) Tahunan (setiap akhir bulan April tahun berikutnya) Bulanan (setiap akhir bulan berikutnya) Tahunan (paling lambat bulan April tahun berikutnya)
26	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	I. Data Kontrak Migas Aktif (per wilayah kerja), yang paling sedikit memuat: 1. Nama Kontraktor 2. Nama Operator 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Operator 4. Alamat Operator 5. <i>Persentase Interest</i> 6. Tanggal kontrak ditandatangani 7. Tanggal kontrak berakhir	Data tahunan kontrak migas aktif yang memuat data wilayah kerja migas	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (paling lambat bulan April tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	8. Wilayah Kerja 9. Status Wilayah Kerja (Eksplorasi/Eksploitasi)	II. Data <i>Plan of Development (PoD)</i> , yang paling sedikit memuat: 1. Surat persetujuan PoD Pertama dari satu wilayah kerja (<i>scanned documents</i>) mulai tahun 2009 2. Surat persetujuan PoD dari satu wilayah kerja (<i>scanned documents</i>) sebelum tahun 2009 berdasarkan permintaan DJP	<p><i>Plan of Development (PoD)</i> Pertama dari satu wilayah kerja</p> <p><i>Plan of Development (PoD)</i> dari satu wilayah kerja yang telah disetujui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi</p>	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (paling lambat bulan April tahun berikutnya)
	III. <i>Data Work Program and Budget (WP & B)</i> revisi, yang paling sedikit memuat: 1. Nama KKKS 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Operator		Data Tahunan <i>Work Program and Budget (WP & B)</i> revisi yang telah disetujui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (setiap awal bulan Desember tahun yang bersangkutan)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Alamat Operator 4. Nama Wilayah Kerja 5. Jenis biaya yang dikeluarkan (<i>exploration, development, production, General Administration</i>) 6. Jumlah biaya					
		IV. <i>Closed Out AFE (Authorization For Expenditure)</i> , yang paling sedikit memuat: 1. Nama KKKS 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKKS 3. Alamat KKKS 4. Nama Wilayah Kerja 5. Nama Proyek 6. Nomor AFE 7. Nomor & tanggal surat persetujuan AFE 8. Nilai persetujuan (Nominal)	Data persetujuan <i>Closed Out AFE</i> yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (paling lambat bulan April tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		V. <i>Data Financial Quarterly Report (FQR)</i> - Terpisah Minyak & Gas, yang paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama KKKS 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKKS 3. Alamat KKKS 4. Nama Wilayah Kerja 5. <i>Lifting</i> (Volume) 6. <i>Gross Revenue</i> 7. <i>First Tranche Petroleum</i> (FTP) 8. <i>Cost Recovery</i> 9. <i>Investment Credit</i> 10. <i>Interest Cost Recovery</i> 11. <i>Government Share</i> 12. <i>Contractor share</i>: 13. <i>FTP share</i> 14. <i>Equity share</i> 15. <i>Lifting Price Variance</i> 16. <i>Domestic Market Obligation (DMO)</i> 17. <i>DMO Fee</i> 18. Bonus 19. Tarif Pajak (persentase) 20. PPs & PBDR 	Data FQR Final dan FQR Hasil Verifikasi oleh SKK Migas yang menjadi dasar perhitungan <i>over/under lifting</i> setiap tahun oleh setiap KKKS Migas	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (paling lambat tanggal 1 Juli tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VI. Data PPN <i>Reimbursement</i> (per Nomor Pokok Wajib Pajak & Nama KKKS), yang paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Vendor 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Vendor 3. Alamat Vendor 4. Nomor Faktur 5. Tanggal Faktur 6. Nilai PPN (Nominal) 7. Uraian/Jenis Transaksi 	Data Triwulan Permohonan Pembayaran kembali PPN/PPnBM yang disampaikan KKKS kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Triwulanan (Setiap akhir bulan berikutnya setelah triwulanan)
		VII. Data Pengalihan <i>Interest</i> , yang paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama yang mengalihkan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mengalihkan 3. Alamat yang mengalihkan 4. Nama penerima <i>interest</i> 	Informasi data pengalihan <i>interest</i>	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (paling lambat bulan April tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima <i>interest</i> 6. Alamat penerima <i>interest</i> 7. Nama Operator 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Operator 9. Alamat Operator 10. Tanggal Pengalihan (<i>Deed of Assignment</i>) 11. Surat Persetujuan Dirjen Migas (Nomor surat & tanggal) 12. Persentase yang dialihkan 13. Wilayah yang dialihkan 14. Nilai pengalihan/ ekuivalen					
		VIII. Data Produksi per tahun, yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan (Operator)	Besarnya hasil produksi meliputi minyak dan gas bumi	Elektronik	Langsung	1 Desember 2013	Tahunan (setiap akhir bulan April tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Data Pelanggan dengan daya 2200 VA ke atas, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor ID Pelanggan 2. Nama Pelanggan 3. Alamat Pelanggan 4. Kabupaten/Propinsi 5. Golongan Tarif 6. Golongan Pelanggan 7. Daya 8. Rupiah Penjualan/ Pemakaian Tenaga Listrik (RPPTL) 9. Bulan dan Tahun Tagihan	Data Pelanggan Bulanan dengan Golongan Tarif Rumah Tangga (R), Sosial (S), Bisnis (B), Industri (I) untuk Golongan Pelanggan Umum dan BUMN/BUMD baik Pelanggan Pasca maupun Prabayar	Elektronik	Online	1 September 2013 untuk data bulan Juli 2013	Bulanan (paling lambat akhir bulan berikutnya)
28	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	I. Profil Akuntan Publik (AP), yang paling sedikit memuat: 1. Nama 2. Alamat tempat tinggal 3. Tempat dan tanggal lahir 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Informasi umum mengenai identitas Akuntan Publik	Elektronik	Online	1 September 2013	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

(1) No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Nomor Registrasi AP 6. Nomor dan tanggal izin AP 7. Nomor dan masa berlaku keanggotaan asosiasi profesi 8. Status AP	Nomor identitas yang diberikan PPAJP kepada Akuntan Publik Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Akuntan Publik Nomor dan jangka waktu keanggotaan pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Meliputi antara lain: a. Penghentian pemberian jasa asuransi untuk sementara waktu (cuti); b. Mengundurkan diri; c. Meninggal; d. Dikenakan sanksi (Pembekuan izin/pembatasan pemberian jasa tertentu/pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu/pencabutan izin); e. Aktif; f. Tidak berlakunya izin				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Nomor dan tanggal Surat Persetujuan/Keputusan serta jangka waktu Persetujuan/Keputusan II. Profil Kantor Akuntan Publik (KAP), yang paling sedikit memuat: 1. Nama KAP 2. Bentuk usaha 3. Nomor registrasi AP pemimpin KAP 4. Nomor dan tanggal izin KAP 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP 6. Alamat KAP 7. Nomor dan tanggal izin cabang KAP 8. Nomor registrasi AP pemimpin cabang	Termasuk Daftar Cabang Perseorangan/ persekutuan/firma Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik	Elektronik	Online	1 September 2013	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang KAP 10. Alamat cabang KAP 11. Status KAP	Meliputi antara lain: a. Penutupan; b. Aktif; c. Dikenakan sanksi (Pembekuan izin/ pembatasan pemberian jasa tertentu/ pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu/ pencabutan izin d. Tidak berlakunya izin				
		12. Nomor dan tanggal Surat Keputusan serta jangka waktu Keputusan III. Daftar dan Riwayat Rekan KAP (AP dan non AP), yang paling sedikit memuat: 1. Nama rekan AP 2. Nomor registrasi AP 3. Nama rekan non AP	Berisi data tempat bekerja AP dan non AP pada suatu KAP	Elektronik	Online	1 September 2013	Triwulan (paling lambat akhir bulan Maret, Juni, September, Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) rekan non AP 5. Surat tanda terdaftar rekan non AP 6. Nama KAP 7. Terhitung mulai					
		IV. Daftar Klien KAP, yang paling sedikit memuat: 1. Nama klien KAP 2. Alamat klien KAP 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Tahun buku 5. Penandatanganan Laporan Auditor Independen (LAI) 6. Opini 7. <i>Go Public/Non Go Public</i> 8. Bidang usaha klien 9. Jumlah laba/rugi bersih klien 10. Jumlah aset klien	Data mengenai entitas yang merupakan klien KAP untuk pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan Nomor register AP yang menandatangani LAI	Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		V. Daftar Auditor KAP, yang paling sedikit memuat: 1. Nama auditor KAP 2. Jenis kelamin (L/P) 3. Nama jabatan pada KAP 4. Terhitung mulai tanggal menempati jabatan pada KAP 5. Posisi dalam pelaksanaan Audit Umum 6. Jam kerja Audit Umum 7. Mulai bekerja 8. Pendidikan terakhir	Daftar pegawai yang bekerja sebagai auditor di KAP	Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)
		VI. Daftar Tenaga Kerja Asing KAP, yang paling sedikit memuat: 1. Nama KAP 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP 3. Nama tenaga asing 4. Pendidikan terakhir 5. Keahlian profesional 6. Kewarganegaraan 7. Mulai bekerja	Daftar pegawai KAP yang berkewarganegaraan asing	Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>8. Nomor dan tanggal Surat Izin Kerja</p> <p>VII. Laporan Keuangan KAP, yang paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama KAP 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP 3. Tahun buku 4. Neraca Komparatif 5. Laporan Laba Rugi Komparatif 6. Laporan Arus Kas <p>VIII. Profil Penilai Publik, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama 2. Alamat tempat tinggal 3. Tempat dan tanggal lahir 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Nomor Izin Penilai Publik (NIPP) 6. Nomor dan tanggal Keputusan 	<p>Informasi umum mengenai identitas Penilai Publik</p> <p>Nomor klasifikasi izin Penilai Publik</p> <p>Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Penilai Publik</p>	Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)
				Elektronik	Online	1 September 2013	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>7. Nomor dan masa berlaku keanggotaan Asosiasi Profesi</p> <p>8. Status Penilai Publik</p> <p>9. Nomor dan tanggal Surat Persetujuan/ Keputusan serta jangka waktu Persetujuan/ Keputusan</p>	<p>Nomor dan jangka waktu berlakunya keanggotaan pada Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Meliputi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk sementara waktu atas permintaan sendiri (cuti); b. Mengundurkan diri; c. Meninggal; d. Dikenakan sanksi (Pembekuan izin/ pencabutan izin) e. Aktif 				
	<p>IX. Profil Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Nama KJPP 2. Bentuk usaha KJPP 		<p>Profil termasuk Daftar Cabang, Daftar Perwakilan, dan Daftar Rekan</p> <p>Perseorangan/ persekutuan/ firma</p>	Elektronik	Online	1 September 2013	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nomor izin Penilai Publik bagi pemimpin/ pemimpin rekan KJPP 4. Nomor dan tanggal izin KJPP 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KJPP 6. Alamat KJPP 7. Nomor dan tanggal izin pembukaan cabang KJPP 8. Nomor izin Penilai Publik pemimpin cabang KJPP 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang KJPP 10. Alamat cabang KJPP 11. Daftar rekan PP 12. Daftar nama rekan non PP	Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha KJPP Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Pembukaan Cabang KJPP Meliputi: a. Nama; b. Nomor Izin				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<p>13. Status KJPP</p> <p>14. Nomor dan tanggal surat keputusan serta jangka waktu Keputusan</p> <p>15. Nomor dan tanggal surat persetujuan pembukaan kantor perwakilan KJPP</p> <p>16. Penanggung jawab kantor perwakilan KJPP</p> <p>17. Alamat kantor perwakilan KJPP</p>	<p>Meliputi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penutupan; b. Aktif; c. Dikenakan sanksi (pembekuan izin/ pencabutan izin); d. Tidak berlakunya izin <p>Nomor dan tanggal Surat Keputusan Kepala PPAJP tentang Persetujuan Pembukaan Kantor Perwakilan KJPP</p> <p>Nama penanggung jawab kantor perwakilan KJPP</p>					
	<p>X. Daftar Klien KJPP, yang paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Nama pemberi tugas/pengguna jasa KJPP 	<p>Data mengenai entitas yang merupakan klien KJPP untuk pemberian jasa penilaian dan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penilaian</p>		Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Alamat pemberi tugas/pengguna jasa KJPP 3. Tahun pelaporan 4. Status <i>Go Public</i> /Non <i>Go Public</i> 5. Kepemilikan 6. Jenis jasa yang diberikan 7. Bidang usaha 8. Nama objek/perusahaan yang dinilai 9. Metode penilaian 10. Nomor dan tanggal laporan 11. Hasil penilaian objek yang dinilai 12. Penilai publik yang menandatangani laporan hasil penilaian	dalam jutaan rupiah				
		XI. Daftar Tenaga Kerja Asing KJPP, yang paling sedikit memuat: 1. Nama KJPP 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KJPP		Elektronik	<i>Online</i>	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nama tenaga asing 4. Nomor dan tanggal izin kerja dari instansi 5. Kewarganegaraan 6. Keahlian 7. Rencana kerja 8. Jangka waktu penugasan		Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)
29	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	XII. Laporan Keuangan KJPP, yang paling sedikit memuat: 1. Nama KJPP 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KJPP 3. Tahun buku 4. Neraca Komparatif 5. Laporan Laba Rugi Komparatif 6. Catatan atas Laporan Keuangan I. Data penginderaan jauh yang diterima stasiun bumi LAPAN, yang paling sedikit memuat: 1. Data Resolusi Menengah Landsat 5		Elektronik	Langsung	1 Februari 2014	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juli dan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Data Resolusi Menengah Landsat 7 3. Data Resolusi Menengah Landsat 8 4. Data Resolusi Tinggi SPOT 5 5. Data Resolusi Tinggi SPOT 6					
30	BPJS Ketenagakerjaan	II. Data penginderaan jauh yang dimiliki LAPAN melalui pengadaan/pembelian data, yang paling sedikit meliputi: 1. Data resolusi tinggi <i>World View</i> 2. Data resolusi tinggi <i>Quick Bird</i> 3. Data resolusi tinggi <i>GeoEye</i> 4. Data resolusi tinggi <i>Pleiades</i>		Elektronik	Langsung	1 Februari 2014	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juli dan Januari)
30	BPJS Ketenagakerjaan	I. Data Pendaftaran Perusahaan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP)		Elektronik	<i>Online</i>	1 Maret 2014	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juli dan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Alamat Perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Bentuk Badan Hukum 6. Jenis Usaha Utama 7. Kepemilikan 8. Jumlah Tenaga Kerja					
		II. Data Tenaga Kerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Peserta 2. Nomor Kartu Peserta 3. Alamat Peserta 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Peserta 5. Tanggal Lahir 6. Status Peserta		Elektronik	Online	1 Maret 2014	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juli dan Januari)
		III. Rincian Iuran Tenaga Kerja, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Kartu Peserta 2. Periode/Masa Laporan 3. Data Upah 4. Iuran JKK	Meliputi: a. total upah setahun b. jumlah bulan upah	Elektronik	Langsung	1 Maret 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Iuran JKM 6. Iuran JP Tenaga Kerja 7. Iuran JP Perusahaan 8. Iuran JHT TK 9. Iuran JHT Perusahaan IV. Data Pendaftaran Proyek Konstruksi, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Pendaftaran 2. Nama Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Sumber Pembiayaan Proyek 5. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi (NKKK) 6. Nilai Komponen Upah dari NKKK 7. Macam/Jenis Pekerjaan 8. Lokasi Proyek 9. Nomor IMB_PB 10. Tanggal IMB_PB 11. Nomor IMB 12. Tanggal IMB 13. Pilih Proyek 14. Jumlah Tenaga Kerja 15. Tanggal Awal Proyek		Elektronik	Langsung	1 Maret 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31	PT Sucofindo	16. Tanggal Akhir Proyek 17. SPK/Kontrak Data survei atas produk pertambangan, yang paling sedikit memuat: I. Data Eksporir 1. Nama Eksporir 2. Alamat Eksporir 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) II. Data Uraian Barang 1. Deskripsi Barang 2. Kode HS III. Data Komoditas 1. Kalori Batubara a) ADB Gross b) ARB Gross c) ARB Nett 2. Kandungan Mineral/ Konsentrat 3. Satuan (Unit) 4. Volume (Tonase) 5. Nilai FOB (USD) IV. Data Pengapalan 1. Waktu Pengapalan 2. Pelabuhan Muat		Elektronik	Langsung	25 Februari 2014	Bulanan (paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32	PT Surveyor Indonesia	Data survei atas produk pertambangan, yang paling sedikit memuat: I. Data Eksportir 1. Nama Eksportir 2. Alamat Eksportir 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) II. Data Uraian Barang 1. Deskripsi Barang 2. Kode HS III. Data Komoditas 1. Kalori Batubara 1) ADB Gross 2) ARB Gross 3) ARB Nett 2. Kandungan Mineral/Konsentrat 3. Satuan (Unit) 4. Volume (Tonase) 5. Nilai FOB (USD)		Elektronik	Langsung	25 Februari 2014	Bulanan (paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IV. Data Pengapalan 1. Waktu Pengapalan 2. Pelabuhan Muat 3. Nama Kapal 4. Nama Perusahaan Pembeli 5. Negara/Tujuan V. Identitas Surveyor 1. Nama 2. Alamat 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) VI. Laporan Surveyor 1. Nomor laporan 2. Tanggal laporan					
33	PT Carsturin	Data survei atas produk pertambangan, yang paling sedikit memuat: I. Data Eksportir 1. Nama Eksportir 2. Alamat Eksportir 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		Elektronik	Langsung	25 Februari 2014	Bulanan (paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data Uraian Barang 1. Deskripsi Barang 2. Kode HS III. Data Komoditas 1. Kalori Batubara a) ADB Gross b) ARB Gross c) ARB Nett 2. Kandungan Mineral/ Konsentrat 3. Satuan (Unit) 4. Volume (Tonase) 5. Nilai FOB (USD) IV. Data Pengapalan 1. Waktu Pengapalan 2. Pelabuhan Muat 3. Nama Kapal 4. Nama Perusahaan Pembeli 5. Negara/Tujuan V. Identitas Surveyor 1. Nama 2. Alamat 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
34	PT Geoservices	VI. Laporan Surveyor 1. Nomor laporan 2. Tanggal laporan Data survei atas produk pertambangan, yang paling sedikit memuat: I. Data Eksportir 1. Nama Eksportir 2. Alamat Eksportir 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) II. Data Uraian Barang 1. Deskripsi Barang 2. Kode HS III. Data Komoditas 1. Kalori Batubara a) ADB Gross b) ARB Gross c) ARB Nett 2. Kandungan Mineral/Konsentrat 3. Satuan (Unit) 4. Volume (Tonase) 5. Nilai FOB (USD)		Elektronik	Langsung	25 Februari 2014	Bulanan (paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)	IV. Data Pengapalan 1. Waktu Pengapalan 2. Pelabuhan Muat 3. Nama Kapal 4. Nama Perusahaan Pembeli 5. Negara/Tujuan V. Identitas Surveyor 1. Nama 2. Alamat 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) VI. Laporan Surveyor 1. Nomor laporan 2. Tanggal laporan		Elektronik	Langsung	1 Februari 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
		I. Data Pemegang Izin Akuntan Publik yang sudah menjadi anggota IAPI, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Akuntan Publik 2. Alamat AP 3. Nomor CPA					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Tanggal CPA 5. Nomor Anggota IAPI 6. Tanggal Anggota IAPI 7. Nomor Izin AP 8. Tanggal Izin AP 9. Kantor Akuntan Publik 10. Terdaftar di OJK (ya/tidak)					
		II. Data Kantor Akuntan Publik, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) 2. Alamat KAP 3. Bentuk KAP 4. Nomor Izin Usaha KAP 5. Tanggal Izin Usaha KAP 6. Nama Rekan Persekutuan 7. Keterangan Rekan Persekutuan 8. Nomor Izin AP 9. Status AP		Elektronik	Langsung	1 Februari 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)	I. Data Anggota Penilai, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Anggota Penilai 2. Alamat Anggota Penilai 3. Tempat Lahir 4. Tanggal Lahir 5. Klasifikasi Penilai 6. Nama Kantor Jasa Penilai Publik 7. Nomor Keanggotaan 8. Tanggal Keanggotaan 9. Status Keanggotaan 10. Nomor Registrasi PPAJP/OJK II. Data Kantor Jasa Penilai Publik, yang paling sedikit memuat: 1. Nama KJPP 2. Alamat KJPP 3. Nomor Izin Usaha KJPP 4. Tanggal Izin Usaha KJPP 5. Nama Rekan Persekutuan		Elektronik	Langsung	1 Februari 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
				Elektronik	Langsung	1 Februari 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi	6. Keterangan Rekan Persekutuan 7. Nomor Registrasi PPAJP/OJK I. Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Polisi 2. Nama Pemilik 3. Alamat 4. Tahun pembuatan 5. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 6. Jenis Kendaraan 7. Merk Kendaraan 8. Tipe Kendaraan 9. Isi Silinder (CC) 10. Bahan bakar II. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Satker/ SKPD 2. Kode Satker/ SKPD 3. NIP Pegawai 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pegawai 5. Nama Pegawai		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
				Elektronik	Online	30 Juni 2016 untuk Tahun Anggaran 2015	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Februari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Alamat Pegawai 7. Tanggal Lahir 8. Jenis Kelamin 9. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 10. Telepon 11. Penghasilan Bruto 12. Penghasilan Neto 13. Neto disetahunkan 14. PTKP 15. PKP 16. PPh Terutang 17. PPh Dipotong 18. PPh KB/LB 19. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Gaji 20. Penghasilan Final 21. PPh Final					
		III. Data Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor SIUP 2. Tanggal SIUP	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Status usaha (Perorangan/Badan Usaha) 4. Nama Perorangan/ Badan Usaha 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perorangan/Badan Usaha 6. Alamat Domisili Perorangan/Badan Usaha 7. Nama Penanggung Jawab Badan Usaha 8. Nomor Induk Kependudukan Perorangan/ Penanggung Jawab Badan Usaha 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penanggung Jawab Badan Usaha	Yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah: CV, PT, Firma, Yayasan, Koperasi, Kelompok, Perkumpulan, dsb NPWP Perorangan/Badan Usaha adalah NPWP cabang/domisili Nomor Induk Kependudukan Pemegang Saham Dominan diisi jika Orang Pribadi				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		10. Nama Pemegang Saham Dominan Badan Usaha 11. Nomor Induk Kependudukan Pemegang Saham Dominan					
		IV. Data Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor SIUP 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang SIUP 3. Nama pemegang SIUP 4. Alamat pemegang SIUP 5. Nomor SIPI 6. Tanggal SIPI 7. Tanggal kedaluwarsa SIPI 8. Nama kapal 9. Gross Ton (GT) 10. Muat bersih (NT) 11. Volume palka	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12. Alat tangkap 13. Tanda selar 14. Wilayah pengelolaan perikanan (WPP RI) 15. Status izin SIPI (Baru/Perpanjangan/Perubahan/Penggantian)					
		V. Data Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin SIUP 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang SIUP 3. Nama pemegang SIUP 4. Alamat pemegang SIUP 5. Nomor izin SIKPI 6. Tanggal izin SIKPI 7. Tanggal kedaluwarsa izin SIKPI 8. Nama kapal 9. Gross Ton (GT) 10. Muat bersih (NT)	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11. Volume palka 12. Tanda selar 13. Status izin SIKPI (Baru/Perpanjangan/Perubahan/Penggantian)					
		VI. Data Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) Ikan berdasarkan <i>logbook</i> , yang paling sedikit memuat: 1. Nama pemilik 2. Nomor SIUP 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan/Badan Usaha 4. Alamat 5. Jenis izin 6. Penanggung jawab 7. Nama kapal 8. <i>Gross Ton</i> kapal 9. Muat bersih (NT) 10. Volume palka	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut. Jenis Izin: Penangkapan, Pengangkut/Pengumpul	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11. Nomor SIPI/SIKPI 12. Alat tangkap 13. Jenis ikan 14. Produksi (Satuan Ton)					
		VII. Data Unit Pengolahan Ikan (UPI), yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan/ Perorangan 2. Alamat domisili unit pengolahan ikan 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/ perorangan 4. Nomor SIUP Pengolahan 5. Tanggal SIUP Pengolahan 6. Tanggal kedaluwarsa SIUP Pengolahan 7. Jumlah kapasitas produksi 8. Jumlah produksi	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Jenis olahan (Beku, Segar, Pengalengan, Ikan Kayu, Pengasapan, Pengeringan, lainnya)					
		VIII. Laporan Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan/ Pelabuhan Perikanan/ PPI/TPI (UPT Daerah), yang paling sedikit memuat: 1. Nama pelabuhan 2. Nama kapal 3. Nomor SIPI/SIKPI 4. Nomor izin SIUP 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang SIUP 6. Nama pemegang SIUP 7. Alamat pemegang SIUP 8. Jenis alat tangkap 9. Waktu penangkapan 10. Daerah penangkapan 11. Pelabuhan pangkalan 12. Jenis ikan 13. Berat ikan	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	<i>Online</i>	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(2)	(3)	Rincian Jenis Data dan Informasi	(4)	(5)	Bentuk Data	(6)	Cara Penyampaian	(7)	Penyampaian Pertama Kali	(8)	Jadwal Penyampaian
		IX. Data Pembayaran Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah, yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/perorangan 2. Nomor SIUP 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang SIUP 4. Nama pemegang SIUP 5. Alamat pemegang SIUP 6. Nomor SIPI 7. Periode pembayaran 8. Tarif 9. Dasar pengenaan 10. Nilai pungutan	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	<i>Online</i>	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)						
		X. Data Laporan Pemasaran Hasil Penangkapan Ikan, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang SIUP	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	<i>Online</i>	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)						

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nama pemegang SIUP 4. Alamat pemegang SIUP 5. Jenis pemasaran 6. Jenis ikan yang dipasarkan 7. Jumlah ikan yang dipasarkan 8. Nilai ikan yang dipasarkan	Ekspor atau dalam negeri Satuan Ton Dalam Rupiah				
		XI. Data Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budaya, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor SIUP/Tanda Pendaftaran 2. Tanggal SIUP/Tanda Pendaftaran 3. Status usaha 4. Nama perusahaan/perorangan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/perorangan	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut Status usaha: Perorangan atau Perusahaan	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Alamat domisili perusahaan/ perorangan 7. Nama penanggung jawab 8. Nomor identitas penanggung jawab 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab 10. Jenis perizinan 11. Jenis komoditas budidaya 12. Alamat kegiatan budidaya 13. Luas areal budidaya 14. Koordinat areal budidaya	Pembibitan; Pembesaran; Pembibitan dan Pembesaran.				
		XII. Data Laporan Kegiatan Usaha (LKU) Perikanan Budidaya, yang paling sedikit memuat: 1. Nama pemilik 2. Nomor SIUP/Tanda Pendaftaran	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan/Badan Hukum 4. Alamat perorangan/Badan Hukum 5. Penanggung jawab 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab 7. Jenis perizinan 8. Alamat kegiatan budidaya 9. Tahun laporan 10. Triwulan laporan 11. Jenis komoditas budidaya 12. Produksi	Jenis Perizinan: Pembibitan; Pembesaran; Pembibitan dan Pembesaran				
		XIII. Data Laporan Pemasaran Hasil Budidaya Ikan, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang SIUP	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut. Satuan Ton	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nama pemegang SIUP 4. Alamat pemegang SIUP 5. Jenis pemasaran 6. Jenis ikan yang dipasarkan 7. Jumlah ikan yang dipasarkan 8. Nilai ikan yang dipasarkan XIV. Data Pertambangan, yang paling sedikit memuat data: 1. Nama pemegang izin pertambangan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang izin pertambangan 3. Alamat pemegang izin pertambangan 4. Instansi penerbit dari izin pertambangan (Pusat, Gubernur atau Bupati) 5. Kode wilayah izin usaha pertambangan	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Februari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Wilayah izin usaha pertambangan (lokasi Kabupaten/Kota) 7. Luas izin usaha pertambangan 8. Jenis izin yang diterbitkan (IUP/IUPK/IPR/IUP OPK/IUJP) 9. Nomor izin pertambangan 10. Tanggal penerbitan izin pertambangan 11. Jangka waktu berlaku izin pertambangan 12. Tahapan kegiatan (penyelidikan umum/ studi kelayakan/ eksplorasi/ konstruksi/produksi) 13. Tahun mulai produksi 14. Jenis hasil tambang (jenis mineral atau batu bara) 15. Jumlah produksi (ton atau satuan tambang lainnya)					

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		16. Jumlah penjualan (ton atau satuan tambang lainnya) 17. Nilai penjualan domestik (IDR/USD) 18. Nilai penjualan ekspor (IDR/USD) 19. Tujuan penjualan domestik 20. Tujuan penjualan ekspor 21. Nilai iuran tetap eksplorasi atau operasi produksi 22. Nilai iuran produksi (Royalti) 23. Tarif iuran tetap 24. Tarif royalti 25. Periode pembayaran iuran 26. SK Pengakhiran Izin Pertambangan (nomor dan tanggal) 27. Peta sebaran tambang 28. Jumlah pembelian (ton atau satuan tambang lainnya)					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		29. Nilai pembelian (IDR/USD)					
		XV. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB)		Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Februari)
		XVI. Data Budidaya Hortikultura, yang paling sedikit memuat: 1. Nama pemegang izin 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang izin 3. Alamat pemegang izin 4. Instansi penerbit izin (Pusat/Gubernur/Bupati/Walikota) 5. Jenis izin yang diterbitkan 6. Nomor izin 7. Tanggal penerbitan izin	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut. Meliputi tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman hias dan tanaman obat Antara lain: Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura, Izin Usaha Budidaya Hortikultura	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Jangka waktu berlakunya izin 9. Kode wilayah izin 10. Wilayah lokasi berada 11. Koordinat luas wilayah 12. Luas wilayah 13. Tahapan kegiatan usaha 14. Jenis tanaman/komoditas 15. Luas tanam (Ha) 16. Waktu tanam/pola tanam 17. Jumlah tanaman 18. Jumlah produksi (Kg/Kw/Ton) 19. Kapasitas unit usaha 20. Jumlah tenaga kerja 21. Jumlah pemakaian pupuk/pestisida per Ha 22. Realisasi pembenihan dan pembibitan (Kg/Batang) 23. Jumlah pabrik pengolahan pemegang izin di wilayah Pemda					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		24. Kapasitas produksi pabrik pengolahan 25. Realisasi produksi pabrik pengolahan 26. Realisasi omzet penjualan hasil pengolahan 27. Nilai penjualan domestik 28. Nilai penjualan ekspor 29. Jenis retribusi 30. Jumlah Iuran Retribusi/PAD 31. Tarif Iuran Retribusi/PAD 32. Periode Pembayaran Iuran Retribusi/PAD 33. Dasar Pengenaan Iuran Retribusi/PAD	Setiap penjualan				
		XVII. Data Jumlah Rata-rata Produksi per Komoditas Tanaman per Ha, untuk Setiap Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XVIII. Data Budidaya Tanaman Pangan/Pertanian, yang paling sedikit memuat: 1. Nama pemegang izin 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang izin 3. Alamat pemegang izin 4. Instansi penerbit izin (Pusat/Gubernur/Bupati/Walikota) 5. Jenis izin yang diterbitkan (antara lain: IUTP, IUTP-P, IUTP-PT, TDU, TDU-P, TDU-PP) 6. Nomor izin 7. Tanggal penerbitan izin 8. Jangka waktu berlakunya izin 9. Kode wilayah Izin 10. Wilayah lokasi Pertanian 11. Koordinat luas wilayah pertanian	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12. Luas wilayah pertanian 13. Jenis tanaman/komoditas 14. Jumlah luas tanam 15. Jumlah luas panen 16. Jumlah penggunaan pupuk dan pestisida 17. Produktivitas/Provitas (Kg per meter persegi) 18. Jumlah produksi (ton) 19. Omzet penjualan hasil pertanian 20. Nilai penjualan domestik 21. Nilai penjualan ekspor 22. Jumlah buruh/karyawan 23. Jumlah retribusi/PAD 24. Tarif Iuran retribusi/PAD 25. Periode pembayaran iuran retribusi/PAD 26. Dasar pengenaan iuran retribusi/PAD	Setiap penjualan				

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(2)	(3)	Rincian Jenis Data dan Informasi	(4)	Deskripsi	(5)	Bentuk Data	(6)	Cara Penyampaian	(7)	Penyampaian Pertama Kali	(8)	Jadwal Penyampaian
		XIX. Data Perkebunan dan Kehutanan, paling sedikit memuat: 1. Nama pemegang izin 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang izin 3. Alamat pemegang izin 4. Instansi penerbit izin (Pusat, Gubernur atau Bupati) 5. Jenis izin yang diterbitkan (antara lain: IUP, IUP-B, IUP-P, IPL, STD-B, STD-P, IPAB) 6. Nomor izin 7. Tanggal penerbitan izin 8. Jangka waktu berlakunya izin 9. Kode wilayah Izin 10. Wilayah lokasi perkebunan/kehutanan berada	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	1 April 2016							Tahunan (paling lambat tanggal 1 April)	

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11. Koordinat luas wilayah perkebunan/kehutanan 12. Luas wilayah perkebunan/kehutanan 13. Tahapan kegiatan usaha 14. Jenis tanaman/komoditas 15. Kelas lahan 16. Jumlah kapasitas produksi lahan 17. Jumlah realisasi produksi lahan 18. Jumlah penggunaan pupuk dan pestisida 19. Realisasi pembenihan dan pembibitan 20. Jumlah pabrik pemegang izin di wilayah Pemda 21. Kapasitas produksi pabrik perkebunan/kehutanan	Contohya: produksi CPO, PKO, kayu bulat, dan Kayu Olahan				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		33. Curah hujan dan hari hujan 34. Investasi 35. Kendaraan/mobil alat berat 36. Pemanfaatan lahan 37. Produksi kebun inti 38. Bahan olah 39. Pembangunan kebun plasma 40. Produksi kebun plasma 41. Pemanfaatan produk sampingan/turunan 42. Peta sebaran perkebunan/kehutanan	Kebun (luas), Pabrik, Bangunan, Mesin, Prasarana Lain. Jenis, Status Kepemilikan Bangunan, pembibitan, TBM, TM, peremajaan, tanaman tua, penggunaan lain Per Jenis Produk : TBS, CPO, Kernel, PKO Bahan Olah, diolah sendiri atau tempat lain Bangunan, Pembibitan, TBM, TM, Peremajaan, Tanaman Tua, Penggunaan lain Per jenis produk: TBS, CPO, Kernel, PKO Jenis Limbah, Bentuk Penanganan				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38	Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten	43. Rencana kerja tahunan dan Rencana kerja umum 44. Laporan penilaian perkebunan 45. Laporan Mutasi Kayu Olahan dan Laporan Mutasi Kayu Bulat I. Data Kepemilikan Hotel/ Penginapan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama hotel/ penginapan 2. Alamat hotel/ penginapan 3. Jumlah kamar 4. Kelas hotel 5. Nama pemilik/ pengelola 6. Alamat pemilik/ pengelola 7. Jumlah Pajak Hotel II. Data Kepemilikan Restoran, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Restoran 2. Alamat Restoran		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
				Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nama Pemilik/ pengelola 4. Alamat pemilik/ pengelola 5. Kapasitas pengunjung 6. Jumlah karyawan 7. Jumlah Pajak Restoran					
		III. Data Usaha Hiburan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama usaha hiburan 2. Alamat usaha hiburan 3. Nama pemilik/ pengelola 4. Alamat pemilik/ pengelola 5. Jenis hiburan 6. Jumlah Pajak Hiburan		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
		IV. Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang paling sedikit memuat: 1. Nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan 3. Alamat objek 4. Nilai perolehan objek pajak 5. Luas tanah dan/atau bangunan 6. Tanggal Transaksi 7. Nilai BPHTB					
		V. Data Surat Izin Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Nama perusahaan 3. Alamat perusahaan 4. Jenis usaha 5. Nama pemilik 6. Alamat pemilik 7. Klasifikasi 8. Modal 9. Jumlah karyawan 10. Masa berlaku		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VI. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama pemohon 4. Alamat pemohon 5. Lokasi bangunan 6. Luas bangunan 7. Jumlah lantai 8. Fungsi/peruntukan bangunan 9. Status tanah		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
		VII. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Satker/SKPD 2. Kode Satker/SKPD 3. NIP pegawai 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pegawai 5. Nama pegawai 6. Alamat pegawai 7. Tanggal lahir 8. Jenis kelamin 9. NIK 10. Telepon		Elektronik	Online	30 Juni 2016 untuk Tahun Anggaran 2015	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Februari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
39	Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)	11. Penghasilan bruto 12. Penghasilan neto 13. Neto disetahunkan 14. PTKP 15. PKP 16. PPh terutang 17. PPh dipotong 18. PPh KB/LB 19. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara gaji 20. Penghasilan final 21. PPh Final	Informasi kontak <i>Registrant</i> atas domain .co.id, .web.id, .or.id, .net.id, .biz.id, .my.i	Elektronik	Langsung	1 Oktober 2013	Semesteran (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah semester berakhir)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(2)	(3)	Rincian Jenis Data dan Informasi	(4)	Deskripsi	(5)	Bentuk Data	(6)	Cara Penyampaian	(7)	Penyampaian Pertama Kali	(8)	Jadwal Penyampaian
		II. Data domain, yang paling sedikit memuat: 1. Nama domain 2. Tanggal domain dibuat 3. Tanggal pemuktahiran terakhir 4. Tanggal daluarsa 5. Nama Registrar 6. Status 7. Nama <i>Server</i>	Informasi atas domain .co.id, .web.id, .or.id, .net.id, .biz.id, .my.id	Elektronik	Langsung	1 Oktober 2013	Semesteran (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah semester berakhir)							
		III. Kontak <i>admin</i> atas <i>domain</i> , yang paling sedikit memuat: 1. ID kontak 2. Tanggal kontak <i>admin</i> dibuat 3. Nama <i>admin</i> 4. Nama organisasi 5. Alamat 6. Kota 7. Provinsi 8. Kode Pos 9. Negara 10. Alamat <i>Email</i> 11. Nomor Telepon 12. Nomor Faksimile	Informasi data <i>Registrar</i> atas domain .co.id, .web.id, .or.id, .net.id, .biz.id, .my.id	Elektronik	Langsung	1 Oktober 2013	Semesteran (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah semester berakhir)							

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IV. Kontak Penagihan atas domain, yang paling sedikit memuat: 1. ID Kontak 2. Tanggal kontak penagihan dibuat 3. Nama Registrar 4. Nama Penanggung Jawab 5. Nama Organisasi Tertagih 6. Alamat 7. Kota 8. Provinsi 9. Kode pos 10. Negara 11. Alamat <i>Email</i> 12. Nomor Telepon 13. Nomor Faksimile	Informasi kontak penagihan atas domain .co.id, .web.id, .or.id, .net.id, .biz.id, .my.id	Elektronik	Langsung	1 Oktober 2013	Semesteran (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah semester berakhir)
		V. Kontak teknikal atas domain, yang paling sedikit memuat: 1. ID Kontak 2. Tanggal kontak teknikal dibuat 3. Nama Registrar 4. Nama Penanggung Jawab	Informasi kontak teknikal atas domain .co.id, .web.id, .or.id, .net.id, .biz.id, .my.id	Elektronik	Langsung	1 Oktober 2013	Semesteran (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah semester berakhir)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Data Pemenang Lelang, yang terdiri dari: 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2. Nama pemenang 3. Alamat 4. Nomor telepon 5. Jenis usaha 6. Tanggal izin usaha 7. Masa berlaku izin usaha 8. Nama paket pekerjaan 9. Lokasi paket pekerjaan 10. Tanggal kontrak	Jenis usaha meliputi: 1. Jasa konstruksi 2. Jasa konsultan 3. Penyedia barang/jasa lainnya	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat 7 hari kerja setelah akhir triwulan)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	11. Nilai kontrak 12. Tanggal surat perintah mulai kerja 13. Masa pelaksanaan		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)
		I. Data Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), yang paling sedikit memuat: 1. Nama badan hukum 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum 3. Alamat badan hukum 4. Nama LKP 5. Alamat LKP 6. Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) 7. Tanggal berdiri LKP 8. Alamat <i>email</i> LKP 9. Alamat <i>website</i> LKP 10. Nomor telepon LKP 11. Nomor faksimile LKP 12. Nama pimpinan LKP 13. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pimpinan LKP					

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(2)	(3)	Rincian Jenis Data dan Informasi	(4)	Deskripsi	(5)	Bentuk Data	(6)	Cara Penyampaian	(7)	Penyampaian Pertama Kali	(8)	Jadwal Penyampaian
		II. Data Sertifikasi Guru, yang paling sedikit memuat: 1. Nama guru 2. Alamat rumah 3. Tempat dan tanggal lahir guru 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guru 5. Nomor Induk Kependudukan (NIK) guru 6. Nomor registrasi guru (NRG) 7. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) 8. Nama instansi tempat mengajar 9. Alamat instansi tempat mengajar	Seluruh data diisi selengkap mungkin sesuai data yang dimiliki	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014			Langsung	1 Desember 2014		Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)		
		III. Data Penerima Dana Bantuan Sosial, yang paling sedikit memuat:	Seluruh data diisi selengkap mungkin sesuai data yang dimiliki	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014			Langsung	1 Desember 2014		Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)		

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama badan hukum 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum 3. Alamat badan hukum 4. Status penerima Bantuan Sosial 5. Tanggal pendirian 6. Alamat <i>email</i> 7. Alamat <i>website</i> 8. Nomor telepon 9. Nomor faksimile 10. Nama pimpinan 11. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pimpinan 12. Nama program bantuan sosial 13. Nilai bantuan sosial 	Komunitas Budaya/Sekolah Negeri/Sekolah Swasta/Lembaga Peduli Pendidikan				
42	Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> I. Data Pembuatan Paspor, yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Pemegang Paspor 2. Nomor Paspor 		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juli dan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Alamat Pemegang Paspur 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemegang Paspur 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemegang Paspur					
		II. Data Persetujuan Visa WNA, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pemegang Visa 2. Nomor Paspur 3. Kewarganegaraan 4. Tanggal terbit paspor 5. Tanggal berakhir paspor 6. Nama Penjamin 7. Alamat Penjamin 8. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penjamin 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penjamin 10. Jenis Visa		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juli dan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		III. Data Perlintasan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pelintas Batas 2. Nomor Paspor 3. Tanggal Masuk Melintas 4. Tanggal Keluar Melintas 5. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Masuk 6. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Keluar	Pada saat pelintas masuk Indonesia) Pada saat pelintas keluar Indonesia	Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juli dan Januari)
43	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	I. Data Pendirian Perseroan Terbatas, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perseroan Terbatas 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Nomor Akta Pendirian 4. Tanggal Akta Pendirian 5. Nama Notaris yang Membuat Akta Pendirian		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pendirian</p> <p>7. Nama Notaris yang Membuat akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pendirian</p> <p>8. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pendirian</p> <p>9. Alamat Lengkap</p> <p>10. Tempat Kedudukan</p> <p>11. Jangka Waktu Berdirinya</p> <p>12. Maksud dan Tujuan</p> <p>13. Kegiatan Usaha</p> <p>14. Jenis Fasilitas</p> <p>15. Jumlah Modal Dasar</p> <p>16. Jumlah Modal Ditempatkan</p> <p>17. Jumlah Modal Disector</p>	<p>Akta Perubahan Dalam Rangka Pendirian (jika ada)</p> <p>Kota/Kabupaten</p> <p>PMA/PMDN Dalam Satuan Mata Uang Rupiah Dalam Satuan Mata Uang Rupiah Dalam Satuan Mata Uang Rupiah</p>				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihaak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		18. Nama Lengkap pemegang Saham 19. Alamat pemegang Saham 20. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemegang Saham 21. Nama Anggota Direksi 22. Alamat Anggota Direksi 23. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anggota Direksi 24. Nama Anggota Dewan Komisaris. 25. Alamat Anggota Dewan Komisaris 26. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anggota Dewan Komisaris 27. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum	Jika orang asing, gunakan Paspor/KITAS/KITAP Jika orang asing, gunakan Paspor/KITAS/KITAP Jika orang asing, gunakan Paspor/KITAS/KITAP				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>28. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum</p> <p>II. Data Perubahan Perseroan Terbatas (PT), yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Nama PT 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Nomor Akta Perubahan 4. Tanggal Akta Perubahan 5. Nama Notaris yang Membuat Akta Perubahan 6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Perubahan 7. Perubahan Alamat Lengkap 8. Perubahan Tempat Kedudukan 	Diisi dalam hal terdapat Data Perubahan	Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan bulan Juni dan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Perubahan Jangka Waktu Berdirinya 10. Perubahan Maksud dan Tujuan 11. Perubahan Kegiatan Usaha 12. Perubahan Jenis Fasilitas 13. Perubahan Jumlah Modal Dasar 14. Perubahan Jumlah Modal Ditempatkan 15. Perubahan Jumlah Modal Disetor 16. Perubahan Nama Lengkap pemegang Saham 17. Perubahan Alamat pemegang Saham 18. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemegang Saham 19. Perubahan Nama Anggota Direksi 20. Perubahan Alamat Anggota Direksi	Jika orang asing, gunakan Paspor/KITAS/KITAP				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		21. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anggota Direksi 22. Perubahan Nama Anggota Dewan Komisaris. 23. Perubahan Alamat Anggota Dewan Komisaris 24. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anggota Dewan Komisaris 25. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 26. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 27. Nomor Pencatatan 28. Tanggal Pencatatan	Jika orang asing, gunakan Paspot/KITAS/KITAP Jika orang asing, gunakan Paspot/KITAS/KITAP				
		III. Data Pembubaran Perseroan Terbatas (PT), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Akta Pembubaran		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Tanggal Akta Pembubaran 3. Nama Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 4. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 5. Nomor penetapan pengadilan atas Pembubaran 6. Tanggal penetapan pengadilan atas Pembubaran 7. Nomor surat Pencatatan Pembubaran 8. Tanggal Surat Pencatatan Pembubaran 9. Nomor surat berakhirnya Badan Hukum 10. Tanggal surat berakhirnya Badan Hukum					

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(2)	(3)	Rincian Jenis Data dan Informasi	(4)	Deskripsi	(5)	Bentuk Data	(6)	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)		IV. Data Pendirian Yayasan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Nomor Akta Pendirian 4. Tanggal Akta Pendirian 5. Nama Notaris yang Membuat Akta Pendirian 6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pendirian 7. Nama Notaris yang Membuat akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pendirian 8. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pendirian 9. Alamat Lengkap	(3)	Dalam hal pendiri/ pengurus/pengawas/ pembina yayasan merupakan orang asing, maka gunakan nomor Paspur/KITAS/KITAP	(4)	(5)	Elektronik	(6)	Online	(7)	(8)	

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3) 10. Tempat Kedudukan 11. Jangka Waktu Berdinya 12. Maksud dan Tujuan 13. Kegiatan 14. Jumlah Kekayaan Awal 15. Nama Lengkap Pendiri 16. Alamat Pendiri 17. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pendiri 18. Nama Pembina 19. Alamat Pembina 20. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pembina 21. Nama Pengurus 22. Alamat Pengurus 23. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pengurus 24. Nama Pengawas 25. Alamat Pengawas 26. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pengawas	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		27. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Yayasan 28. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Yayasan					
		V. Data Perubahan Yayasan, yang paling sedikit memuat: 1. Perubahan Nama Yayasan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Nomor Akta Perubahan 4. Tanggal Akta Perubahan 5. Nama Notaris yang Membuat Akta Perubahan 6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Perubahan		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		19. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pengawas 20. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 21. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 22. Nomor Pencatatan 23. Tanggal Pencatatan	Jika orang asing, gunakan Paspot/KITAS/KITAP				
		VI. Data Pembubaran Yayasan, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Akta Pembubaran 2. Tanggal Akta Pembubaran 3. Nama Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 4. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pembubaran		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Nomor penetapan pengadilan atas Pembubaran 6. Tanggal penetapan pengadilan atas Pembubaran 7. Nomor surat Pencatatan Pembubaran 8. Tanggal Surat Pencatatan Pembubaran					
		VII. Data Pendirian Perkumpulan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perkumpulan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Nomor Akta Pendirian 4. Tanggal Akta Pendirian 5. Nama Notaris yang Membuat Akta Pendirian 6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pendirian	Dalam hal pendiri/ pengurus/pengawas/ pembina yayasan merupakan orang asing, maka gunakan nomor Paspot/KITAS/KITAP	Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semester (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Nama Notaris yang Membuat akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pendirian 8. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pendirian 9. Alamat Lengkap 10. Tempat Kedudukan 11. Jangka Waktu Berdirinya 12. Maksud dan Tujuan 13. Kegiatan Perkumpulan 14. Nama Lengkap Pendiri 15. Alamat Pendiri 16. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pendiri 17. Nama Pengurus 18. Alamat Pengurus					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		19. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pengurus 20. Nama Pengawas 21. Alamat Pengawas 22. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pengawas 23. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan 24. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan					
		VIII. Data Perubahan Perkumpulan, yang paling sedikit memuat: 1. Perubahan Nama Perkumpulan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Nomor Akta Perubahan 4. Tanggal Akta Perubahan	Dalam hal pendiri/pengurus/pengawas/pembina yayasan merupakan orang asing, maka gunakan nomor Paspot/KITAS/KITAP	Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Nama Notaris yang Membuat Akta Perubahan 6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Perubahan 7. Perubahan Alamat Lengkap 8. Perubahan Tempat Kedudukan 9. Perubahan Jangka Waktu Berdirinya 10. Perubahan Maksud dan Tujuan 11. Perubahan Kegiatan Perkumpulan 12. Perubahan Nama Pengurus 13. Perubahan Alamat Pengurus 14. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pengurus 15. Perubahan Nama Pengawas 16. Perubahan Alamat Pengawas					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		17. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pengawas 18. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 19. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 20. Nomor Pencatatan 21. Tanggal Pencatatan					
		IX. Data Pembubaran Perkumpulan, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Akta Pembubaran 2. Tanggal Akta Pembubaran 3. Nama Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 4. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 5. Nomor penetapan pengadilan atas Pembubaran		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Tanggal penetapan pengadilan atas Pembubaran 7. Nomor surat Pencatatan Pembubaran 8. Tanggal Surat Pencatatan Pembubaran					
		X. Data Notaris, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Notaris 2. Tempat Lahir Notaris 3. Tanggal Lahir Notaris 4. Alamat Rumah Notaris 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Notaris 7. Alamat Kantor 8. Wilayah Kerja Notaris 9. Nomor SK Pengangkatan Sebagai Notaris		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
44	Kementerian Perindustrian	10. Tanggal SK Pengangkatan Sebagai Notaris 11. Tanggal Berita Acara Sumpah (tanggal berlakunya melaksanakan jabatan sebagai Notaris) 12. Nomor SK Perpindahan Wilayah Kerja sebagai Notaris (apabila ada) 13. Tanggal SK Perpindahan Wilayah Kerja sebagai Notaris (apabila ada) 14. Nomor Telepon dan Faksimile		Elektronik	Online	10 Oktober 2014	Triwulanan (setiap tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	7. Kapasitas Silinder (CC) 8. Jenis TPT 9. Jumlah Impor 10. Realisasi Impor 11. Nomor TPT 12. Tanggal terbit TPT	meliputi : a. Uji Tipe b. Impor c. Produksi	Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (SIUAAU/NTB), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat Domisili 6. Nama Penanggung jawab (Direktur Utama) 7. Alamat Penanggung jawab		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari)
		III. Data Produksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 2. Nama Perusahaan 3. <i>Aircraft Km</i> 4. <i>Aircraft departure</i> 5. <i>Aircraft hours</i>		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. <i>Passenger carried</i> 7. <i>Freight carried</i> (dalam ton) 8. <i>Passenger Km</i> 9. <i>Available Seat Km</i> 10. <i>Passenger Load Factor</i> (dalam %) 11. <i>Ton KM Performed</i> a. <i>Passenger</i> b. <i>Freight</i> c. <i>Mail</i> d. <i>Total</i> 12. <i>Available Ton KM</i> 13. <i>Weight Load Factor</i> (dalam %) IV. Data Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 2. Nama Perusahaan 3. Tanda Pendaftaran pesawat udara 4. <i>Serial Number</i> pesawat 5. Tipe pesawat		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
46	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan	6. <i>Year of manufacturing</i> 7. Tanggal Registrasi 8. Nama pemilik pesawat 9. Alamat pemilik pesawat 10. Lessor pesawat I. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Surat Keputusan Izin 2. Tanggal Surat Keputusan Izin 3. Nama Perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat Domisili 6. Masa Berlaku 7. Nama Direktur 8. Jumlah Armada Bus Antar Kota Antar Provinsi 9. Jumlah Armada Antar Jemput Antar Provinsi		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 28 Februari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Surat Keputusan Izin 2. Tanggal Surat Keputusan Izin 3. Nama Perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat Domisili 6. Masa Berlaku 7. Nama Direktur 8. Jumlah Armada Bus Pariwisata 9. Jumlah Armada Taksi khusus Bandara Soekarno Hatta		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 28 Februari)
		III. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan/atau Alat Berat, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Surat Keputusan Izin		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 28 Februari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
47	Kementerian Kesehatan	1. Data Izin Penyalur Alat Kesehatan (Alkes) dan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat 2. Tanggal Surat Keputusan Izin 3. Nama Perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat Domisili 6. Masa Berlaku 7. Nama Direktur 8. Jumlah Armada Barang khusus 9. Jumlah Armada Alat Berat	a. AK.1 (Sertifikat Produksi alkes/PKRT) b. AK.2 (Izin Penyalur alkes)	Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Nama Direktur 7. Nama Penanggung Jawab Teknis					
		II. Data Izin Pedagang Besar Farmasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)
		III. Data izin Industri Farmasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)
		IV. Data Izin Industri Obat Tradisional, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat V. Data izin Industri Ekstrak Bahan Alam, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat VI. Data izin Industri Kosmetika, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat VII. Daftar Apotek, yang paling sedikit memuat: 1. Nama 2. Nomor Izin apotek 3. Alamat		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)
				Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)
				Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Nama Apoteker Penanggung Jawab VIII. Daftar Rumah Sakit teregistrasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Rumah Sakit 2. Jenis Rumah Sakit 3. Kelas Rumah Sakit 4. Alamat Rumah Sakit 5. Direktur 6. Penyelenggara 7. Kabupaten/Kota 8. Kode Pos 9. Telepon 10. Faksimile 11. <i>Email</i> 12. Telepon Humas 13. Website 14. Data Izin	Kemenkes/Propinsi/ kabupaten kota/swasta	Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)
48	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	I. Daftar BUMN, yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (Paling lambat tanggal 31 Juli)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Jenis Usaha 4. Alamat Kedudukan 5. Tanggal Izin Usaha 6. Jumlah Cabang 	<p>Tanggal izin usaha diisi untuk BUMN yang berdiri sejak tahun 2010</p>	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (Paling lambat tanggal 31 Juli)
		<ol style="list-style-type: none"> II. Ikhtisar Kinerja BUMN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Tahun Buku 4. Total Aset 5. Total Penjualan/ Pendapatan 6. Total Biaya (Harga Pokok Penjualan + Beban Usaha) 7. Laba/Rugi Usaha 8. Pendapatan dan Beban Lain-Lain (<i>Netto</i>) 9. Laba/Rugi Bersih 10. <i>Return on Investment</i> (ROI) 11. <i>Return on Asset</i> (ROA) 					

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		III. <i>Listing Utang Rekening Dana Investasi/ Subsidiary Loan Agreement (RDI/SLA)</i> , yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama BUMN 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Jumlah Utang 		Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (Paling lambat tanggal 31 Juli)
		IV. Penyerapan Dana <i>Public Service Obligation (PSO)</i> , yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama BUMN 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Jumlah Nilai Subsidi 		Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (Paling lambat tanggal 31 Juli)
		V. Data Restrukturisasi Perusahaan BUMN, yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Program <i>Rightsizing</i> BUMN yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama BUMN 		Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (Paling lambat tanggal 31 Juli)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
49	Kementerian Agama	b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) c. Nilai sebelum d. Nilai sesudah 2. Data Program Privatisasi BUMN, yang terdiri dari: a. Nama BUMN b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) c. Persentase Saham yang Dilepas d. Metode Privatisasi e. Nilai Privatisasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Januari)
		I. Data Jemaah Haji Khusus, yang paling sedikit memuat: 1. Nama jemaah haji 2. Alamat jemaah haji 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) jemaah haji 4. Tempat lahir jemaah haji					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Tanggal lahir jemaah haji 6. Tahun keberangkatan 7. Nama Penyelenggara Ibadah Haji Khusus 8. Alamat Penyelenggara Ibadah Haji Khusus					
		II. Data Penyelenggara Haji Khusus, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan 2. Nama perusahaan penyelenggara 3. Alamat perusahaan 4. Nomor Izin 5. Tanggal Izin 6. Masa berlaku izin 7. Jumlah jemaah yang diberangkatkan 8. Tahun keberangkatan 9. Nama penanggung jawab 10. Alamat penanggung jawab		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11. Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab III. Data Penyelenggara Umrah, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan 2. Nama perusahaan penyelenggara 3. Alamat perusahaan 4. Nomor Izin 5. Tanggal Izin 6. Masa berlaku izin 7. Nama penanggung jawab 8. Alamat penanggung jawab 9. Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab</p> <p>I. Data Tahunan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang memuat data pertambangan mineral dan batubara meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama perusahaan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan 3. Alamat perusahaan 4. Persentase kepemilikan 5. Tahapan kegiatan kerja (eksplorasi/eksplorasi) 6. Tanggal kontrak ditandatangani 7. Tanggal kontrak berakhir 8. Luas Wilayah Kerja 9. Lokasi Wilayah Kerja 10. Tanggal kontrak diperpanjang 	Data Tahunan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Tanggal penerbitan IUP/IUPK 10. Jangka waktu penerbitan IUP/IUPK					
		III. Data pembayaran royalti atau Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) oleh Kontraktor Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) oleh masing-masing Kontraktor yang paling sedikit memuat : 1. Nama Perusahaan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Lokasi Wilayah Pertambangan 5. Luas Wilayah Pertambangan 6. Jenis mineral dan batubara 7. Jumlah produksi	Data pembayaran royalti atau Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) oleh Kontraktor Kontrak Karya atau PKP2B oleh masing-masing Kontraktor	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Nilai penjualan 9. Jumlah Royalti yang Dibayar 10. Periode Pembayaran Royalti					
		IV. Data pembayaran iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran produksi (royalti) oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)/Izin Pertambangan Rakyat (IPR) baik mineral maupun batubara yang paling sedikit memuat : 1. Nama pemegang IUP/IUPK/IPR 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang IUP/IUPK/IPR 3. Alamat pemegang IUP/IUPK/IPR 4. Kode Wilayah IUP/IUPK/IPR	Data pembayaran iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran produksi (royalti) oleh pemegang IUP/IUPK/IUPR baik mineral maupun batubara	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Luas Wilayah IUP/IUPK/IPR 6. Lokasi Wilayah IUP/IUPK/IPR 7. Tahapan kegiatan usaha 8. Jenis mineral dan batubara 9. Jumlah Produksi 10. Nilai Penjualan 11. Jumlah Iuran Tetap 12. Jumlah Iuran Eksplorasi 13. Jumlah Iuran Produksi (Royalti) 14. Periode Pembayaran Iuran					
		V. Data Badan Usaha Jasa Penunjang Pertambangan yang telah mendapat izin dari Pemerintah Pusat, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Badan Usaha 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha	Data Badan Usaha Jasa Penunjang Pertambangan yang telah mendapat izin dari pemerintah	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Alamat Badan Usaha 4. Jenis dan bidang usaha yang dilakukan 5. Nomor Izin Usaha 6. Tanggal Izin Usaha 7. Lokasi usaha					
		VI. Data cadangan terkira/terbukti atas pertambangan mineral dan batubara per wilayah untuk Kontrak Karya dan PKP2B	Informasi data cadangan terkira/terbukti atas pertambangan mineral dan batubara per wilayah kerja	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)
		VII. Data Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara Kontraktor Kontrak Karya dan PKP2B, yang paling sedikit memuat : 1. Nama Perusahaan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Lokasi wilayah pertambangan	Data Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara Kontraktor Kontrak Karya dan PKP2B	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data Semester I tahun 2014)	Semesteran (setiap akhir bulan Januari dan Juli)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5. Luas wilayah pertambangan 6. Jumlah produksi 7. Nilai penjualan Domestik 8. Nilai penjualan Ekspor 9. Tujuan penjualan Domestik 10. Tujuan penjualan Ekspor 11. Jumlah yang diolah di dalam negeri	Nomor 6, 7, dan 8 merupakan data per bulan atau disesuaikan dengan pembayaran royalti atau Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data Semester I tahun 2014)	Semesteran (setiap akhir bulan Januari dan Juli)	
	VIII. Data Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara pemegang IUP/IUPK/IPR baik mineral maupun batubara yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang paling sedikit memuat: 1. Nama pemegang IUP/IUPK/IPR	Data Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara pemegang IUP/IUPK/IPR baik mineral maupun batubara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang diterima oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data Semester I tahun 2014)	Semesteran (setiap akhir bulan Januari dan Juli)	

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang IUP/IUPK/IPR 3. Alamat pemegang IUP/IUPK/IPR 4. Lokasi wilayah pertambangan 5. Luas wilayah pertambangan 6. Jumlah produksi 7. Nilai penjualan Domestik 8. Nilai penjualan Ekspor 9. Tujuan penjualan Domestik 10. Tujuan penjualan Ekspor 11. Jumlah yang diolah di dalam negeri	Nomor 6, 7, 8, dan 9 merupakan data per bulan atau disesuaikan dengan pembayaran iuran royalti				
		IX. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kontrak Karya dan PKP2B yang telah disetujui Ditjen Minerba per tahun yang paling sedikit memuat:	Laporan RKAB Kontraktor Kontrak Karya dan PKP2B yang telah disetujui Ditjen Minerba untuk setiap Kontraktor dan per tahun	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Tanggal disetujui RKAB 					
		<p>X. Laporan RKAB pemegang IUP/IUPK/IPR baik mineral maupun batubara yang telah disetujui oleh penerbit IUP/IUPK/IPR per tahun yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pemegang IUP/IUPK/IPR 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang IUP/IUPK/IPR 3. Alamat pemegang IUP/IUPK/IPR 4. Lokasi IUP/IUPK/IPR 5. Luas IUP/IUPK/IPR 6. Tanggal disetujui RKAB 	<p>Laporan RKAB pemegang IUP/IUPK/IPR baik mineral maupun batubara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang diterima oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.</p>	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XI. Harga Patokan Batubara (HPB) untuk setiap jenis batubara baik <i>steam coal</i> maupun <i>cooking coal</i> setiap bulan. XII. Harga Batubara Acuan (HBA) untuk setiap jenis batubara baik <i>steam coal</i> maupun <i>cooking coal</i> setiap bulan.		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Bulanan (setiap awal bulan berikutnya)
51	Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	I. Neraca Energi di Indonesia untuk jenis minyak bumi, gas bumi dan batubara, yang paling sedikit memuat: 1. Data produksi 2. Data impor 3. Data ekspor 4. Data penjualan II. Data komoditas mineral di Indonesia yang paling sedikit memuat : 1. Data produksi 2. Data ekspor 3. Data penjualan	Data Neraca Energi di Indonesia untuk jenis minyak bumi, gas bumi dan batubara setiap tahun	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (setiap bulan April tahun berikutnya)
			Data komoditas mineral di Indonesia untuk mineral utama seperti tembaga, emas, perak, bauksit, nikel, bijih dan pasir besi, dan timah.	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (setiap bulan April tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
52	Kementerian Pertanian	I. Data Pendaftaran Pupuk Anorganik, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 4. Nomor Pendaftaran 5. Nama Dagang/Merk 6. Jenis Pupuk II. Data Pendaftaran Pupuk Organik, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 4. Nomor Pendaftaran 5. Nama Dagang/Merk 6. Jenis Pupuk III. Data Pendaftaran Pestisida, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
				Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
				Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 4. Nomor Pendaftaran 5. Nama Dagang Formulasi 6. Jumlah Formulasi 7. Pengadaan dalam tahun laporan 8. Penyaluran dalam tahun laporan					
		IV. Data Pengujian Alat dan Mesin Pertanian, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pemohon 2. Nama Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Merk Dagang		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		V. Data Pendaftaran Obat Hewan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan Obat 2. Alamat Perusahaan 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Nomor Pendaftaran 5. Jenis Obat 6. Data Ekspor/Impor					
		VI. Data Pendaftaran Pakan Ternak, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 4. Nama Dagang 5. Jenis Pakan 6. Kode Pakan		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		VII. Data Laporan Produksi Pakan Ternak, yang paling sedikit memuat: 1. Tahun laporan 2. Nama Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 5. Produksi		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)

(1) No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(2) Rincian Jenis Data dan Informasi	(3) Deskripsi	(4) Bentuk Data	(5) Cara Penyampaian	(6) Penyampaian Pertama Kali	(7) Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3) VIII. Data Izin Usaha Obat Hewan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 4. Jumlah Pabrik 5. Alamat Lokasi Pabrik	(4)	(5) Elektronik	(6) Langsung	(7) 20 Desember 2014	(8) Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		IX. Pelayanan Pengawasan Karantina Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Penggangu Tumbuhan Karantina (OPTK), yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pengguna Jasa 2. Alamat Pengguna Jasa 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengguna Jasa 4. Nama Media Pembawa		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Negara Asal 6. Volume X. Data Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pemohon 2. Alamat Pemohon 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon 4. Jenis Tanaman 5. Banyak Benih 6. Negara Pengirim 7. Negara Tujuan 8. Tempat Pemasukan/ Pengeluaran		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		XI. Data Izin Pemasukan Bibit Ternak, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Negara Asal 5. Nama Bibit Ternak 6. Jenis Bibit Ternak 7. Galur/Ras/Bangsa Bibit Ternak 8. Jumlah Bibit Ternak					
		XII. Rekomendasi Teknis Pemasukan Daging, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Rekomendasi 2. Nama Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 5. Negara Asal 6. Jenis 7. Pelabuhan Masuk		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		XIII. Data Izin Pemasukan Agens Hayati, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pengguna Jasa 2. Alamat Pengguna Jasa 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Nama Agens Hayati 5. Tujuan Pemasukan 6. Asal Negara 7. Jumlah Agens Hayati XIV.Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 4. Lokasi Kebun 5. Luas 6. Kapasitas 7. Jenis Izin Usaha 8. Jenis Komoditas XV. Daftar Perusahaan perkebunan Sawit, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 4. Lokasi 5. Luas		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
				Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)

(1) No	(2) Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(3) Rincian Jenis Data dan Informasi	(4) Deskripsi	(5) Bentuk Data	(6) Cara Penyampaian	(7) Penyampaian Pertama Kali	(8) Jadwal Penyampaian
53	Kementerian Komunikasi dan Informatika	I. Data Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nama penyelenggara 2. Alamat 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Nomor Akta Pendirian 5. Tanggal Akta Pendirian 6. Jenis Jasa 7. Nomor Izin 8. Tanggal izin 9. Jangka waktu izin II. Data Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nama penyelenggara 2. Alamat 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Nomor Akta Pendirian 5. Tanggal Akta Pendirian 6. Jenis Jaringan 7. Nomor Izin 8. Tanggal izin		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)
				Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Jangka waktu izin III. Data Perizinan Lembaga Penyiaran, yang paling sedikit memuat: 1. Nama 2. Alamat lembaga/perusahaan 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Nomor Akta Pendirian 5. Tanggal Akta Pendirian 6. Jenis penyiaran 7. Nomor Izin 8. Tanggal izin 9. Jangka waktu izin		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)
		IV. Data Pemegang Standardisasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. Alamat	Jangka waktu sertifikasi tiga tahun	Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 4. Nomor sertifikat 5. Tanggal sertifikat 6. Merek-tipe 7. Negara Asal Perangkat 8. Jenis sertifikasi 9. Kelompok Alat					
		V. Data Pemegang Landing Right/Hak Labuh (Penye-lenggara Telekomunikasi atau Lembaga Penyiaran), yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 4. Nomor hak labuh 5. Tanggal hak labuh 6. Nama Satelit 7. Asal negara satelit 8. Jangka waktu hak		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VI. Data Pemegang Izin Stasiun Radio (ISR), yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 4. Jenis <i>service</i> 5. Jenis <i>subservice</i> 6. Nomor izin 7. Tanggal izin 8. Jumlah Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)
		VII. Data Pemegang Izin Pita Frekuensi Radio (CDMA, GSM/DCS, UMTS/WCDMA, BWA), yang paling sedikit memuat: 1. Nama operator 2. Alamat 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
54	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4. Pita frekuensi 5. Nomor Izin 6. Tanggal Izin 7. Jangka waktu izin 8. Jumlah Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi I. Data Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/perorangan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/perorangan 3. Alamat perusahaan/perorangan 4. Domisili hukum 5. Nomor izin 6. Tanggal izin 7. Nomor identitas penanggung jawab 8. Nama penanggung jawab	dapat berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ Nomor Paspor	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahuman (paling lambat setiap bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab					
		II. Data Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. Nama kapal 3. Nomor izin SIPI 4. Tanggal izin SIPI 5. Tanggal kedaluwarsa SIPI 6. Gross Ton (GT) 7. Alat tangkap 8. Tanda selar 9. Wilayah penangkapan 10. Status izin		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)
		III. Data Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. Nama kapal 3. Nomor izin SIKPI 4. Tanggal izin SIKPI		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Tanggal kedaluwarsa SIKPI 6. Gross ton 7. Tanda selar 8. Status izin IV. Data Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/perorangan 2. Alamat unit pengolahan ikan 3. Jenis produk 4. Nomor izin produk 5. Tanggal terbit izin produk 6. Tanggal masa berlaku produk 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab	Sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasional standar sanitasi.	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(2)	(3)	Rincian Jenis Data dan Informasi	(4)	Deskripsi	(5)	Bentuk Data	(6)	Cara Penyampaian	(7)	Penyampaian Pertama Kali	(8)	Jadwal Penyampaian
		V. Data Izin Pemasukan Hasil Perikanan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/ penanggung jawab 2. Alamat perusahaan/ penanggung jawab 3. Nomor izin 4. Tanggal izin 5. Masa berlaku 6. Jenis Produk yang akan dimasukkan 7. Jumlah produk yang akan dimasukkan 8. Tempat pemasukkan 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)		Langsung	15 Desember 2014		Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)		
		VI. Data Lalu Lintas Ikan di dalam dan luar negeri (ekspor, impor, antar wilayah dalam negeri), yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)		Langsung	15 Desember 2014		Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)		

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1. Nama perusahaan/ perorangan2. Alamat perusahaan/ perorangan3. Nomor izin instalasi karantina ikan4. Tanggal izin instalasi karantina ikan5. Masa berlaku6. Wilayah pemasaran7. Jenis lalu lintas (ekspor, impor, antar wilayah dalam negeri)8. Jenis Produk yang dipasarkan9. Jumlah produk yang dipasarkan/tahun10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)perusahaan/ perorangan11. Nama pemilik/ penanggung jawab	Wilayah pemasaran berisi negara tujuan				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik/penanggung jawab VII. Data Izin Penyediaan Obat Ikan (Produsen, Importir), yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/ perorangan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/ perorangan 3. Alamat 4. Status (produsen/ importir) 5. Nomor izin 6. Tanggal izin 7. Masa berlaku 8. Nama pemilik/ penanggung jawab 9. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik/penanggung jawab		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

(1) No	(2) Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(3) Rincian Jenis Data dan Informasi	(4) Deskripsi	(5) Bentuk Data	(6) Cara Penyampaian	(7) Penyampaian Pertama Kali	(8) Jadwal Penyampaian
		VIII. Data Produsen Perbenihan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/ perorangan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan 3. Alamat perusahaan/ perorangan 4. Jenis komoditas perbenihan (tawar/payau/laut) 5. Jumlah omzet tahunan (ekor) 6. Nama pemilik/ penanggung jawab 7. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik/ penanggung jawab		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)
		IX. Data Usaha Budidaya, yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Nama perusahaan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan 3. Alamat 4. Jenis perizinan 5. Nomor izin 6. Tanggal izin 7. Masa berlaku 8. Komoditas budidaya 9. Nama penanggung jawab 10. Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab	Jenis Perizinan/ Rekomendasi: 1. Izin Pemasukan Ikan Hidup 2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan di Bidang Pembudidayaan Ikan 3. Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XI. Data Transaksi Importase Obat Ikan, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor IPOI 2. Nama Perusahaan yang melakukan Impor Obat Ikan 3. Alamat Perusahaan yang melakukan Impor Obat Ikan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan yang melakukan Impor Obat Ikan 5. Nomor Surat Keterangan Pemasukan Obat Ikan 6. Tanggal Surat Keterangan Pemasukan Obat Ikan 7. Nomor Invoice 8. Merk Dagang Obat Ikan 9. Negara Asal Obat Ikan 10. Mata Uang Nilai Impor		Elektronik	Langsung	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11. Nilai Impor yang dilakukan Perusahaan per Transaksi 12. Kuantitas Impor Obat Ikan 13. Satuan Impor Obat Ikan (g/kg/ton/ml/1/vial)					
		XII. Data Harga Benih Ikan/Udang per Provinsi, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Provinsi 2. Jenis Komoditas (Ikan/Udang) 3. Ukuran (cm, inch) 4. Harga Benih per Ekor (Khusus Unit Pemberihan Milik Pemerintah) 5. Sumber Data Harga Benih		Elektronik	Langsung	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XIII. Data Importasi Bahan Baku/Pakan Ikan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 4. Tanggal terbit Surat Keterangan Teknis 5. Nama Produk 6. Jenis Produk (Bahan Baku atau Pakan Ikan) 7. Volume Produk 8. Satuan dari Volume (Metric Ton) 9. Nilai Produk 10. Satuan Mata Uang Nilai Produk (USD, JPY, IDR, atau sejenis) 11. Negara Asal Produk 12. Nomor Invoice Impor 13. Tanggal Invoice Impor		Elektronik	Langsung	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
55	Kementerian Ketenagakerjaan	I. Data Pengguna Tenaga Kerja Asing, yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/instansi 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/instansi 3. Alamat perusahaan/instansi 4. Nomor telepon, nomor faksimile, <i>email</i> 5. Jumlah tenaga kerja asing II. Daftar Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Indonesia, yang paling sedikit memuat: 1. Nama LPTKS 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) LPTKS 3. Nama pimpinan atau penanggung jawab LPTKS 4. Alamat LPTKS	Data pengguna tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Triwulanan (paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan)
			Data yang disampaikan sebatas data LPTKS yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		III. Daftar Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan 3. Nama pimpinan atau penanggung jawab 4. Alamat perusahaan	Data yang disampaikan sebatas data PPTKIS yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Desember)
56	Komisi Pemilihan Umum	I. Data Calon Anggota Legislatif, yang paling sedikit memuat: 1. Nama 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Tempat lahir 5. Tanggal lahir 6. Alamat rumah 7. Riwayat pekerjaan terakhir 8. Partai 9. Daerah Pemilihan		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang paling sedikit memuat: 1. Nama 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Tempat lahir 5. Tanggal lahir 6. Alamat rumah 7. Riwayat pekerjaan terakhir 8. Daerah Pemilihan		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Desember)
		III. Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Partai Penerima Sumbangan 2. Nama Penyumbang 3. Nomor Identitas Penyumbang		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penyumbang 5. Alamat Penyumbang 6. Kriteria Penyumbang 7. Bentuk sumbangan 8. Nilai sumbangan (rupiah) 9. Kuantitas sumbangan (unit) 10. Keterangan	Perserorangan/kelompok/ badan usaha Uang/barang/jasa Kuantitas barang yang disumbangkan				
		IV. Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye calon anggota DPD, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Calon Anggota DPD Penerima Sumbangan 2. Nama Penyumbang 3. Identitas Penyumbang 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penyumbang 5. Alamat Penyumbang		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Kriteria Penyumbang 7. Bentuk sumbangan 8. Nilai sumbangan (rupiah) 9. Kuantitas sumbangan (unit) 10. Keterangan	Perserorangan/kelompok/ badan usaha Uang/barang/jasa Kuantitas barang yang disumbangkan	(5)	(6)	(7)	(8)
		V. Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Penerima Sumbangan 2. Nama Penyumbang 3. Identitas Penyumbang 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penyumbang 5. Alamat Penyumbang 6. Kriteria Penyumbang	Perserorangan/kelompok/ badan usaha	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57	Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	1. Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Polisi 2. Nama Pemilik 3. Alamat Pemilik 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik 5. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemilik 6. Tahun pembuatan 7. Tahun Registrasi 8. Jenis Kendaraan 9. Merk Kendaraan 10. Tipe Kendaraan 11. Isi Silinder (cc) 12. Bahan Bakar	Uang/barang/jasa Kuantitas barang yang disumbangkan	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

(1) No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(2) (3) Rincian Jenis Data dan Informasi	(4) Deskripsi	(5) Bentuk Data	(6) Cara Penyampaian	(7) Penyampaian Pertama Kali	(8) Jadwal Penyampaian
		II. Data Mutasi kendaraan/ perubahan identitas Kendaraan Bermotor, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Polisi lama 2. Nama Pemilik lama 3. Alamat Pemilik lama 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik lama 5. Nomor Induk Kependudukan (NIK)Pemilik lama 6. Nomor Polisi baru 7. Nama Pemilik baru 8. Alamat Pemilik baru 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru 10. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemilik baru 11. Tahun pembuatan 12. Jenis Kendaraan 13. Merk Kendaraan 14. Tipe Kendaraan 15. Isi Silinder (cc) 16. Bahan Bakar	Data mutasi kendaraan adalah informasi yang terkait arus perpindahan kendaraan, baik itu kepemilikan maupun lokasi.	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

(1) No	(2) Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(3) Rincian Jenis Data dan Informasi	(4) Deskripsi	(5) Bentuk Data	(6) Cara Penyampaian	(7) Penyampaian Pertama Kali	(8) Jadwal Penyampaian
58	Kementerian Pertahanan	I. Data Izin Produksi, Pengadaan, Penyimpanan, Pendistribusian dan Jasa Peledak, yang paling sedikit memuat : 1. Nama Perusahaan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 3. Alamat 4. Jenis Perizinan 5. Nama Penanggung Jawab Perusahaan 6. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penanggung Jawab II. Data Informasi Peserta dan Pemenang Lelang atau Seleksi atau Penyedia Barang dan Jasa di Lingkungan Kemenhan dan TNI, yang paling sedikit memuat :	Penanggung Jawab adalah Dirut/Pihak yang nyata- nyata bertanggung jawab	Elektronik	Langsung (<i>email</i>)	10 Desember 2014 (data mulai tahun 2013)	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)
				Elektronik	Langsung (<i>email</i>)	10 Desember 2014 (data mulai tahun 2013)	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Kontrak 2. Nama Kontrak 3. Penyelenggara Pengadaan 4. Nama Perusahaan Pemegang Pengadaan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Pemegang Pengadaan 6. Alamat Perusahaan Pemegang Pengadaan 7. Nama Penanggung Jawab Perusahaan 8. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Pajak (NPWP) Penanggung Jawab 10. Harga Perkiraan Sendiri 11. Nilai Kontrak 					
59	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	I. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA), yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		II. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		III. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		IV. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi V. Data Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VI. Data Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VII. Data Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas di atas 6000m ³ /thn (IUIPHHK >6000 m ³ /thn), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VIII. Data Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IX. Data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan/ Non Tambang, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(2)	(3)	Rincian Jenis Data dan Informasi	(4)	Deskripsi	(5)	Bentuk Data	(6)	Cara Penyampaian	(7)	Penyampaian Pertama Kali	(8)	Jadwal Penyampaian
				<p>X. Data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Survey/Eksplorasi, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi 			Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)				
				<p>XI. Data Izin Lembaga Konservasi (LK), yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 			Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		XII. Data Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		XIII. Data Izin Pengekar Tumbuhan dan Satwa Liar, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi 11. Kuota Edar Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)					
		XIV. Data Izin Usaha Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPSWA), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		XV. Data Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Luas 10. Lokasi XVI. Data Izin Ekspor Benih/ Bibit Tanaman Hutan, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XVII. Data Izin Impor Benih/Bibit Tanaman Hutan, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)
60	Kementerian Koperasi dan UKM	I. Data Koperasi, yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (setiap bulan Maret)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Nama Koperasi 2. Nomor Badan Hukum 3. Tanggal Berdiri Koperasi 4. Alamat 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Daftar Nama Pengurus 7. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pengurus 8. Bidang Usaha II. Data Penerima Program Bantuan Kementerian Koperasi dan UKM, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Penerima Bantuan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima Bantuan 3. Nomor Pendirian Badan Hukum Penerima Bantuan 4. Tanggal Pendirian Badan Hukum Penerima Bantuan	Diisi jika penerima bantuan merupakan badan hukum Diisi jika penerima bantuan merupakan badan hukum	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (setiap bulan Maret)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61	Badan Pusat Statistik (BPS)	5. Alamat Penerima Bantuan 6. Tahun Anggaran 7. Nama Program 8. Nilai Bantuan (dalam rupiah) I. Direktori Eksportir/Importir, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Direktori 2. Tahun 3. Nama perusahaan 4. Alamat perusahaan 5. Klasifikasi produk berdasarkan <i>Harmonized System (HS)</i>	Merupakan direktori dari 10 (sepuluh) perusahaan dengan nilai ekspor/impor terbesar dalam satu tahun.	Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)
		II. Direktori Industri Manufaktur, yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. Alamat perusahaan 3. Klasifikasi produk berdasarkan <i>Harmonized System (HS)</i>		Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		III. Direktori Perkebunan Sawit, yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. Alamat perusahaan		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)
		IV. Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Lapangan Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. PDB atas dasar harga berlaku 2. PDB atas dasar harga konstan 2000		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Triwulanan (paling lambat akhir bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan)
		V. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. PDRB atas dasar harga berlaku 2. PDRB atas dasar harga konstan 2000	PDRB untuk tiap kabupaten/kota dan provinsi	Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

(1) No	(2) Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(3) Rincian Jenis Data dan Informasi	(4) Deskripsi	(5) Bentuk Data	(6) Cara Penyampaian	(7) Penyampaian Pertama Kali	(8) Jadwal Penyampaian
		VI. Statistik Impor HS Terpilih yang paling sedikit memuat: 1. Nilai 2. Berat 3. Pelabuhan 4. Nama komoditas 5. Negara asal 6. KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)/kode ISIC <i>(International Standardization Industrial Code)</i>		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Triwulanan (paling lambat akhir bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		VII. Statistik Ekspor HS Terpilih, yang paling sedikit memuat: 1. Nilai 2. Berat 3. Pelabuhan 4. Nama komoditas 5. Negara tujuan 6. KBLI/kode ISIC		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Triwulanan (paling lambat akhir bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VIII. PDRB menurut Penggunaan, yang paling sedikit memuat: 1. PDRB atas dasar harga berlaku 2. PDRB atas dasar harga konstan 2000		Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)
		IX. Peta digital wilayah seluruh Kabupaten/Kota per desa/Kelurahan		Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)
		X. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) variabel terpilih	Data mikro Susenas	Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)
		XI. Data sakernas variabel terpilih	Data mikro survei angkatan kerja nasional	Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)
		XII. Publikasi Tabel <i>input-Output</i>	Data yang menjelaskan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian nasional	Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XIII. <i>Master file</i> desa		Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan (setiap akhir bulan Desember)
62	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	XIV. Data potensi desa (variabel terpilih) Data Sertifikasi Dosen, yang paling sedikit memuat: 1. Nama dosen 2. Alamat rumah 3. Tempat dan tanggal lahir dosen 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dosen 5. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dosen 6. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) 7. Nama instansi tempat mengajar 8. Alamat instansi tempat mengajar	Data mikro Seluruh data diisi selengkap mungkin sesuai data yang dimiliki	Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya)
				Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (30 April tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data balai lelang, yang paling sedikit memuat: 1. Nama badan hukum 2. Nama penanggung jawab 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Nomor izin 5. Masa berlaku izin 6. Status (Aktif/Tidak aktif) 7. Alamat 8. Frekuensi lelang per tahun 9. Pokok lelang dalam satu tahun 10. Bea lelang dalam satu tahun		Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
		III. Data pejabat lelang kelas II, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pejabat lelang Kelas II 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
64	PT Taspen (Persero)	4. Nomor izin 5. Masa Berlaku izin 6. Status (Aktif/Tidak aktif) 7. Alamat 8. Frekuensi lelang 9. Pokok lelang 10. Bea lelang I. Data penerima pensiun, paling sedikit memuat: 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2. NIP atau NRP 3. Nama 4. Alamat 5. Jenis Kelamin 6. Tanggal Lahir 7. Status Tanggungan 8. Tahun perolehan 9. Penghasilan Bruto 10. Penghasilan Neto 11. Penghasilan Neto setahun/disetahun-kan 12. PTKP 13. PKP	Nomor Induk Pegawai/ Nomor Registrasi Prajurit (untuk TNI)	Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		14. PPh terutang 15. PPh dipotong 16. PPh KB/LB 17. Kantor bayar 18. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 19. Telepon 20. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kantor cabang 21. Nama kantor cabang					
		II. Data Peserta Aktif, yang paling sedikit memuat: 1. NIP atau NRP 2. Nama 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 4. Pangkat/ golongan 5. Alamat 6. Jenis kelamin 7. Tanggal lahir 8. Nama instansi 9. Gaji pokok 10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kantor cabang 11. Nama kantor cabang	Peserta aktif meliputi data PNS Pusat dan Daerah	Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya)

(1) No	(2) Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(3) Rincian Jenis Data dan Informasi	(4) Deskripsi	(5) Bentuk Data	(6) Cara Penyampaian	(7) Penyampaian Pertama Kali	(8) Jadwal Penyampaian
65	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	I. Data izin undian gratis berhadiah, yang paling sedikit memuat: 1. Nama penerima izin 2. Alamat lengkap penerima izin 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima izin 4. Nama program 5. Nomor registrasi 6. Periode 7. Total hadiah 8. Jangka waktu penyelenggaraan 9. Nomor Surat Keputusan Menteri 10. Aktivitas terakhir 11. Jatuh tempo laporan 12. Status 13. Jumlah hadiah 14. Waktu penyelenggaraan II. Data pemenang Undian Gratis Berhadiah, yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya)
				Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
66	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Alamat 4. Uraian hadiah yang diterima 5. Jumlah hadiah yang diterima 6. Nilai hadiah yang diterima 7. Waktu pengambilan hadiah 8. PPh Final atas hadiah undian 9. Tanggal penyetoran SSP 10. NTPN 	Jenis produk: obat/obat tradisional/kosmetik/suplemen makanan/produk pangan	Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan (paling lambat bulan April tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
67	Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit, meliputi: 1. Pan Indonesia Bank, Ltd. Tbk. 2. PT Bank ANZ Indonesia 3. PT Bank Bukopin, Tbk. 4. PT Bank Central Asia, Tbk.	4. Nama produk 5. Nama perusahaan pendaftar 6. Alamat perusahaan pendaftar 7. Nama produsen 8. Alamat produsen 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan pendaftar Data Transaksi Nasabah Kartu Kredit, yang paling sedikit memuat: 1. Nama bank 2. Nomor rekening kartu kredit 3. ID <i>merchant</i> 4. Nama <i>merchant</i> 5. Nama pemilik kartu 6. Alamat pemilik kartu 7. Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor paspor pemilik kartu 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kartu	Merk produk Data bersumber dari <i>Billing Statement</i> Nama bank/lembaga penyelenggara kartu kredit Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk WNI; Nomor paspor untuk WNA	Elektronik	<i>Online</i>	Paling lambat 31 Mei 2016	Bulanan (paling lambat akhir bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 6. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 7. PT Bank MNC Internasional 8. PT Bank ICBC Indonesia 9. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk 10. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk 11. PT Bank Mega, Tbk.	9. Bulan tagihan 10. Tanggal transaksi 11. Rincian transaksi 12. Nilai transaksi 13. Pagu kredit	Keterangan transaksi Dalam Rupiah Limit kartu kredit				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	12. PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero), Tbk. 13. PT Bank Negara Indonesia Syariah 14. PT Bank OCBC NISP, Tbk. 15. PT Bank Permata, Tbk. 16. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 17. PT Bank Sinarmas 18. PT Bank UOB Indonesia						

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
68	Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, meliputi: 1. PT Hutchison 3 Indonesia 2. PT Indosat, Tbk	Data pelanggan jaringan bergerak seluler pasca bayar, yang paling sedikit memuat: 1. Nama pelanggan 2. Tempat lahir pelanggan 3. Tanggal lahir pelanggan 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelanggan 5. Nomor telepon bergerak seluler	Nomor 1, 2, 3, dan 4 merupakan nama, tempat, tanggal lahir dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dokumen identitas pelanggan Merupakan nomor telepon seluler (jaringan bergerak)	Elektronik	Online	15 Januari 2018 untuk masa Oktober s.d. Desember 2017	Triwulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pencetakan tagihan)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia 4. PT Smartfren Telecom, Tbk 5. PT Smart Telecom 6. PT Telekomunikasi Selular 7. PT XL Axiata, Tbk	6. Nomor telepon lain yang dapat dihubungi (jika ada) 7. <i>Email</i> 8. Alamat domisili pelanggan 9. Alamat penagihan pelanggan (jika berbeda dari no.8) 10. Jumlah Tagihan Bulanan	Nomor 6 dan 7 merupakan nomor telepon lain dan <i>email</i> yang dapat dihubungi (sesuai data yang tersedia) Merupakan alamat domisili pelanggan Merupakan alamat penagihan pelanggan (sesuai data yang tersedia) Merupakan jumlah tagihan bulanan termasuk jumlah tagihan langganan data (dalam Rupiah)	Elektronik	<i>Online/</i> Langsung	15 Januari 2018 untuk masa Oktober s.d. Desember 2017	Triwulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pencetakan tagihan)
69	Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, SLJJ dan/atau SLI meliputi: 1. PT Indosat, Tbk 2. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	Data pelanggan jaringan tetap lokal, yang paling sedikit memuat: 1. Nama pelanggan 2. Tempat lahir pelanggan 3. Tanggal lahir pelanggan 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelanggan 5. Nomor telepon	Nomor 1, 2, 3, dan 4 merupakan nama, tempat, tanggal lahir dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dokumen identitas pelanggan Merupakan nomor telepon tetap	Elektronik	<i>Online/</i> Langsung	15 Januari 2018 untuk masa Oktober s.d. Desember 2017	Triwulanan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pencetakan tagihan)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. PT Batam Bintan Telekomunikasi	6. Nomor telepon lain yang dapat dihubungi 7. <i>Email</i> 8. Alamat domisili pelanggan 9. Alamat penagihan pelanggan (jika berbeda dari no.8) 10. Jumlah Tagihan Bulanan	Nomor 6 dan 7 merupakan nomor telepon lain dan <i>email</i> yang dapat dihubungi (sesuai data yang tersedia) Merupakan alamat domisili pelanggan Merupakan alamat penagihan pelanggan (sesuai data yang tersedia) Merupakan jumlah tagihan bulanan termasuk jumlah tagihan langganan data (dalam Rupiah)				

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAMAWATI